

346.012
Hur

v c1

**KEKUATAN AKTA NOTARIS
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PRAKTEK PENGADILAN**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

MAGISTER KENOTARIATAN

**Disusun Oleh
SITI NURYANTI
B4 B001195**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
AGUSTUS
2003**

THESIS

KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PRAKTEK PENGADILAN

OLEH
SITI NURYATI
B4 B00 1195

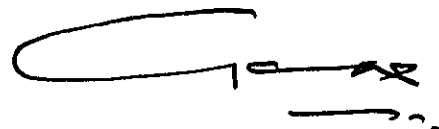
Mengetahui,

Pembimbing,

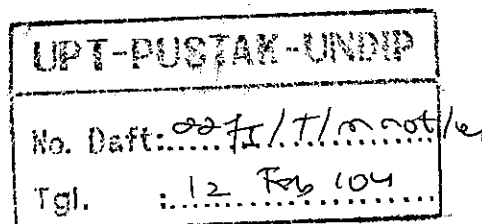


R. SUHATO, SH. M. Hum

Ketua Program
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH



**KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PRAKTEK
PENGADILAN**

DISUSUN OLEH

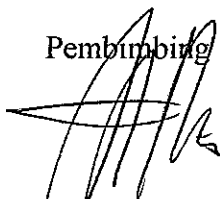
Siti Nuryati
B4B001195

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 20 - 8 - 2003

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

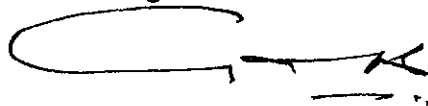
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Pembimbing



R. Suharto, S.H, M.Hum

Mengetahui



Prof. I.G.N. Sugangga, S.H,

ABSTRAKSI

Akta Notaris memberikan di antara pihak-pihak berserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya sesuatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan dalam akta notaris.

Ini berarti bagi Hakim merupakan bukti wajib, karena Akta Notaris mempunyai kekuatan lahiriah, formil dan materil.

Untuk mengetahui bagaimana kekuatan Akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna dalam peradilan, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat inferensial analisis. Data dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Akta Notaris yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dalam peradilan adalah Akta Notaris yang menerangkan kebenaran formil para pihak dalam Akta Notaris dan kebenaran apa yang diterangkan (materinya), dengan terpenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan UU, PJN dan kode etik notaris, sehingga terhindar dari masalah hilangnya stempel otentisitas akta, hilangnya kekuatan eksekutorial jika akta notaris tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan dibatalkannya akta tersebut oleh pengadilan serta malapetaka bagi notaris karena ia harus membayar ganti kerugian dan denda pada para pihak dalam aktanya.

Hal ini yang perlu diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Notaris adalah pemberian keseimbangan akses informasi dan kesempatan yang diberikan oleh hukum kepada semua pihak yang berkontrak, serta dilandasi sikap pribadi Notaris dalam melaksanakan tugasnya berupa kemandirian, sikap, tidak memihak, jujur, seksama dan penguasaan terhadap perundang-undangan serta keahlian dan keterampilan dalam menerapkan peraturan tersebut.

ABSTRACT

Notary certificate gives among parties together with it's heritage distribution or the person who got's the night's a kind of a perfect proof what has been done or stated in notary certificate.

For a judge it means such on proof obligation, because notary certificate as a perfect proof media in the judgment.

Research using *yuridis empiris* approachment and inferensial analitis with using sample pointment by sampling quota. Data in research based from primer and secunder data. From the result of the research, it is acknowledged that notary certificate which describe the formil truth to each parties in certificate and the truth of what it is described (it's material).

Research these formalities fulfilment which is dended by UU, PJN an Kode Etik Notaris, so can be varide from losing authentic certificate stamps. The losing of executorial power from these certificate if notary certificate has executorial power.

The thing which is needed to notice by notary in making notary certificate is giving proportional information access and opportunity which is given by law to all in parties, also based on notary personality in doing his job such as independently behavior, fair, honest, careful and the ability in government rule also expertise and good skill in practicing those rules.

MOTTO

.....Raihlah kesempatan selagi kau bisa

Tesis ini kupersembahkan untuk

- ✓ Diriku sendiri
- ✓ Bapak dan Emak tercinta
- ✓ Anakku Rifgi fadhlurrahman
- ✓ Adikku Ratna Sari Dewi dan Pamuji serta
Rafli Aji Prakoso

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat – Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat bukti Dalam Praktek Pengadilan.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan universitas Diponegoro.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, maka penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **Bapak R. Suharto, SH. M. Hum**, selaku pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini. Integritas beliau sebagai akademisi dan figur yang selama ini dirasakan oleh penulis telah memberikan kesan yang berarti bagi penulis.

11. Ari wahyudi Darmabrata, SH, atas segala bantuannya;
12. Mas Susaeri dan Bapak-Ibu pegawai secretariat program Kenotariatan Undip;
13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro Angkatan 2001 khususnya Lolita Jauw, S.H.
14. Semua pihak dan para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang
telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal
sampai akhir tesis ini;

Dan terutama dan utama terima kasih kepada Bapak H. Rodjali dan Ibu Hj.
Munawaroh, anakku Rifqi Fadhlurrahman, dan Rafli Aji Prakoso serta Adikku Ratna
Sari Dewi dan Pamuji.

Semarang,

Penulis

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dalam tulisan ini.

Semarang,

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB. I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat penelitian	13
 BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	 14
A. Pembuktian pada Umumnya	14
1. Arti Penting Pembuktian	14
2. Teori Pembuktian	21
3. Beban Pembuktian	23
4. Alat-alat bukti	32

B. Pembuktian Dengan Akta	34
1. Pengertian Akta.....	34
2. Fungsi Akta	39
3. Kekuatan Pembuktian Akta.....	40
4. Jenis Akta	41
C. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	54
D. Pembatalan Akta Notaris.....	66
BAB III. METODE PENELITIAN.....	73
A. Lokasi Penelitian.....	73
B. Metode Pendekatan	74
C. Spesifikasi Penelitian	74
D. Metode Penentuan Sampel.....	75
1. Populasi	75
2. Teknik Sampling	77
E. Teknik Pengumpulan Data.....	80
1. Studi Kepustakaan.....	80
2. Survey Lapangan.....	82
3. Alat Pengumpul Data	83
F. Metode Penyajian Data	83
G. Metode Analisa yang Digunakan	84
H. Meted Pengecekan Validitas Data	84

BAB. IV. PEMBAHASAN	86
A. Tugas jabatan notaris Selaku Pelaksanaan Hukum	87
B. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti	94
1. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Pengadilan	94
2. Pembatalan Alat Notaris Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Ddalam Praktek Pengadilan	113
C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya	154
BAB. V. PENUTUP	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dengan Sistem Hukum Kontinental seperti Indonesia, dikenal pembuktian dengan tulisan yang dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan¹⁾

Suatu akta otentik ialah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara).

Dengan demikian Undang-undang dengan tegas menyatakan, bahwa suatu akta adalah akta otentik apabila :

1. Bentuknya ditentukan dengan Undang-undang ;
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum ;
3. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.

¹⁾ Sebaliknya Negara dengan sistem Anglo Saxon mendasarkan pada pembuktian dengan keterangan saksi, tulisan-prive documents-berada "dibawah" pembuktian dengan saksi. dengan perkataan lain-lain ini berarti bawah kepercayaan terhadap bukti tulisan digantungkan dengan pembuktian dari keterangan saksi, Alat bukti tertulis yang dibuat para pihak dihadapan seorang pejabat serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat tidak dikenal didalam hukum pembuktian Negara dengan sistem Anglo Saxon, Herlien, *akta otentik dan notaris pada sistem hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan tentang Hukum Ketiga* (Bandung : Mandar Maju, 1998) hal. 124.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk pelaksanaan pembuatan akta otentik tersebut. Perwujudan tentang perlunya kehadiran Pejabat Umum untuk “lahirnya” akta otentik tidak dapat dihindarkan, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik tersebut harus pula diatur dengan Undang-undang.

Dengan demikian perihal baik Pejabat Umum maupun “hasil pekerjaannya” harus diatur dengan Undang-undang (atau peraturan perundang-undangan setingkat dengan Undang-undang), agar baik pejabatnya maupun aktanya memiliki kedudukan dan bobot serta sifat “terkuat”.

Untuk memenuhi hal tersebut, pembuat Undang-undang kemudian mengadakan Reglement OP het Notaris-Ambt in Indonesie (Ordonantie 11 Januari 1860, S. 1860-3), yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (selanjutnya akan disingkat dengan PJN). Dapat dikatakan bahwa PJN merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata.

Untuk lebih jelasnya yang dimaksud dengan Notaris menurut ketentuan Pasal 1 dari PJN adalah sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu

akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain".²⁾

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 PJN tersebut, menurut Wawan Setiawan³⁾, terlihat bahwa di satu pihak wewenang notaris diuraikan luas, dan dilain pihak pasal tersebut mengadakan pembatasan terhadap wewenang notaris :

- Pertama-tama dinyatakan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik, hanya apabila itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan, hal mana berarti : bahwa notaris tidak berwenang membuat akta otentik secara jabatan (*ambtholve*). Dengan demikian notaris tidak berwenang membuat akta dibidang hukum publik (*Publiekrechtelijke Akter*). Wewenangnya terbatas pada pembuatan akta di bidang hukum perdata.
- Perkataan-perkataan tersebut dikaitkan pula dengan perkataan "yang berkepentingan", yang berkepentingan di sini di maksudkan adalah :
 1. Yang menghendaki akta otentik ; dan
 2. Bahwa "Perjanjian dan ketetapan" Senantiasa merupakan pembuatan dari orang-orang yang menugaskan kepada notaris untuk membuat akta itu atau dengan perkataan lain, bukan merupakan perbuatan dari notaris itu

²⁾ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : Erlangga, 1890) hal. 31

³⁾ Wawan Setiawan, Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat bukti Tertulis dan Otentik menurut Hukum Positif Indonesia Majalah Media Notariat, Januari-April-Juli-Oktober 1995, hal. – 63

sendiri, maka kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa : dengan yang dinamakan “perbuatan” tidak mungkin juga termasuk didalamnya “perbuatan” notaris itu sendiri.

Selain itu menurut G.H.S Lumban Tobing dari ketentuan Pasal 1 PJN dapat diketahui dengan jelas, bahwa wewenang notaris “*regel*” (bersifat umum) sedang wewenang pejabat lainnya adalah : pengecualian”. Wewenang dari pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila Undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau suatu pembuatan akta tertentu, mereka oleh Undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.⁴⁾

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh Undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain :

1. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara) ;
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdara) ;
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara) ;
4. Akta proses wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHPerdara) ;
5. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 KUHPerdara) ;

⁴⁾ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 38.

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya), Sedang yang disebut angka 5 notaris tidak berwenang untuk membuatnya akan tetapi hanya oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.⁵⁾

Produk-produk notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di bidang Hukum Pembuktian akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mempunyai arti penting yang membedakannya dengan akta di bawah tangan.

Pembuktian akta notaris mempunyai arti bahwa :

1. Akta tersebut memberikan kewajiban kepada lawan untuk membuktikan kebalikannya dengan pengertian bahwa : tidak perlu dibuktikan tanda tangan dari notaris adalah benar ;
2. Bahwa keterangan yang dibuat notaris di dalam aktanya dianggap benar, selain daripada itu, akta tersebut menjamin kepastian tanggal dibuatnya, siapa

⁵⁾ Ibid. hal. 38

yang membuatnya dan kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh para pihak.

Sebagai alat bukti yang sempurna akta notaris terdiri dari dua golongan yang berkaitan dengan pemberian permasalahan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta :

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*) ;
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).

Pembedaan yang dimaksud di atas penting menurut G.H.S.Lumban Tobing, dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*)⁶⁾

⁶⁾ Ibid . hal. 53

Menurut Setiawan, bukti tentang kebalikannya (*tegenbewijs*) terhadap akta otentik, bertujuan untuk mendukung dalil yang menyatakan bahwa suatu akta notaris itu palsu ataupun yang menyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta notaris tidak benar.⁷⁾

Kepalsuan suatu akta notaris – seperti halnya akta pada umumnya dibedakan antara kepalsuan materiil (*materiele valsheid*) dan kepalsuan intelektual (*intelektual valsheid*). Dikatakan ada kepalsuan materiil apabila terdapat cacat pada kekuatan pembuktian dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*). Kepalsuan intelektual (*intellectual valsheid*) mengandung arti bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta tidak berdasar kebenaran. Dengan mengemukakan adanya kepalsuan intelektuil maka seseorang menyerang kekuatan pembuktian materiil (*materiil bewijskracht*) suatu akta.⁸⁾

H.I.R. tidak mengatur tatacara khusus pembuktian tentang kebalikannya (*tegenbewijs*) dalam hal seorang mendalilkan kepalsuan suatu akta.

Pengaturan khusus tentang tata cata khusus pembuktian perihal asli atau tidak aslinya suatu bukti tertulis, tercantum dalam pasal 148 dan seterusnya dari Rv. Dikenal dengan “valsheidprocedure.” Siapa yang menyatakan bahwa akta itu memuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi akta itu (*materiele geknoi*),

⁷⁾ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara* (Jakarta : Aksara Baur, 1987). hal. 410

⁸⁾ Ibid. hal. 410

misalnya adanya perkataan-perkataan yang dihapus atau diganti dengan yang lain ataupun ditambahkan.⁹⁾

Lain halnya dengan akta di bawah tangan, yang di dalam bidang pembuktian tidak mengenal kepastian yang berhubungan dengan kebenaran tanggal dan penandatangannya.

Bagi hakim akta di bawah tangan merupakan bukti bebas bisa diterima atau tidak bisa diterima. Oleh karena itu, akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedangkan kekuatan formilnya baru terjadi bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan demikian akta dibawah tangan dinyatakan palsu maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta dibawah tangan itu tidak palsu.

Dengan demikian pembuatan akta notaris yang melihat pada cara pembuatan, isi dan redaksi serta berdasarkan keterangan para pihak, dibuatlah suatu bentuk yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijamin kebenarannya.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, notaris wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-undang khususnya Peraturan Jabatan

⁹⁾ Ibid. hal. 410

Notaris dan Kode Etik Notaris, ketentuan mana merupakan keharusan yang wajib ditaati oleh seorang notaris

Bagi notaris, PJN adalah peraturan jabatan yang mutlak dan sama sekali tidak boleh disimpangi karena merupakan *dwingen recht* (hukum yang memaksa).

Pelanggaran atas formalitas yang ditentukan oleh PJN dapat mengakibatkan :

1. Hilangnya stempel otentisitas dari akta tersebut, sehingga kekuatan pembuktiannya seperti akta dibawah tangan, tetapi akta tersebut tetap merupakan akta notaris, sehingga termasuk dalam protokol notaris dan harus disimpan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 61 PJN ;
2. Hilangnya kekuatan eksekutorial dari akta tersebut, namun demikian notaris tetap berhak memberikan salinan, kutipan atau grosse dari akta tersebut menurut ketentuan Pasal 41 PJN ;
3. Adanya sanksi terhadap notaris dihadapan siapa akta tersebut dibuat, sehingga notaris diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dan bunga pada yang dirugikan.

Pelanggaran terhadap persyaratan yang harus dipenuhi ketentuan Undang-undang untuk sahnya suatu perbuatan hukum, yang harus dituangkan dalam suatu akta notaris, mengakibatkan isi dan aktanya batalnya, misalnya pada Surat Kuasa

Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Jadi baik perbuatan hukum maupun aktanya batal.

Namun apabila akta notaris tidak cacat secara yuridis, maka hanya perbuatan hukumnyalah yang dibatalkan. Mengingat pada dasarnya notaris hanya mencatat apa yang kemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya (yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08 September 1973, nomor 702 K / Sip / 1973).¹⁰⁾

Pada kenyatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tiga tahun terakhir (Januari 2000 sampai dengan Desember tahun 2002) ada 44 akta notaris yang dibatalkan dengan putusan Pengadilan dari 7 perkara perdata.

Adanya putusan Pengadilan yang membatalkan akta notaris seolah-olah ada kontradiksi antara wewenang seorang notaris dengan kesempurnaan akta otentik yang dibuatnya. Dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut, jika dilihat secara umum terdapat suatu perbedaan antara teori (peraturan bagi notaris) dan praktek (adanya putusan tentang pembatalan akta notaris oleh Pengadilan).

Kontradiksi tersebut di atas, makin diperkuat dengan kaidah hukum yang dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 487 K / Pdt / 1991 tanggal 30 April 1996, sebagai berikut :

¹⁰⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 126.

“Akta otentik tidak dapat dibatalkan kecuali proses pembuatannya terdapat adanya dwang, dwaling en bedrog”

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk thesis yang berjudul :

“KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PRAKTEK PENGADILAN”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang menyangkut kekuatan akta notaris sebagai alat bukti dalam praktek pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dibatalkannya oleh Pengadilan akta notaris yang dibuat secara sah ?
2. Bagaimana tanggung jawab seorang notaris terhadap akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya?

Untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut, penulis membatasi diri hanya menganalisa kekuatan akta notaris sebagai alat bukti dalam pengadilan perdata.

C. Tujuan Penelitian

Penulis thesis ini berfokus pada penelaahan mengenai kekuatan akta notaris sebagai alat bukti dalam praktek Pengadilan. Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dibatalkannya oleh Pengadilan akta notaris yang dibuat secara sah ;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, agar mempunyai kekuatan pembuatan sempurna.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan peraturan di bidang hukum perdata dan hukum acara perdata khususnya Peraturan jabatan Notaris.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengawasan dan tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, sedangkan bagi hakim sebagai referensi dalam menghadapi akta notaris yang

dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan pembatalan akta notaris dalam praktek Pengadilan, begitupun bagi praktisi hukum lainnya sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengajukan gugatan pembatalan akta notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Pada Umumnya

1. Arti Penting Pembuktian

Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

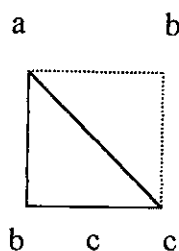
Disebutkan pula dalam Pasal 163 HIR, bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Istilah “membuktikan” dalam Pasal 1865 KUHPerdata menurut Djoko Soepadmo, ada tiga macam pengertian yang pada umumnya ditulis dalam buku-buku ilmu hukum sejak dahulu kala. Pada umumnya dibedakan antara :¹¹⁾

¹¹⁾ Djoko Supatmo, *Tehnik Pembuatan Akta Seri B-4 bagian ke dua* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994)., hal. 481

a. Membuktikan secara logis.

Sejak permulaan dalam ilmu pengetahuan, bahwa dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pasti membuktikan berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Misalkan Pitagoras memberikan aksioma atau dalil dalam suatu segitiga bahwa adalah $a^2 = b^2 + c^2$.



Penjelasan : a adalah sisimiring dan b dan c adalah siku-siku.

b = 4 M. c = 3 M. berapakah = a ?

Pada segi tiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya.

$$4^2 + 3^2 = a^2 \rightarrow 16 + 9 = 25 (a^2)$$

$$a = \sqrt{25} = 5 \text{ M}$$

$$b \text{ dan } c = 4 + 3 = 7\text{M}$$

Dalam praktek, kita dapat menguji dari pengalaman orang-orang. Misalnya: bidang abcd adalah lapangan rumput di suatu desa. Kalau dari titik a ke titik c dia mestinya melewati jalur jalan yang sudah disediakan yaitu titik a b c. Akan tetapi, sering kita akan melihat bahwa jalur rumput dari a ke c sudah menjadi jalan setapak, tidak ada rumput yang tumbuh, karena orang-orang mengambil istilahnya jalan pintas, dari a langsung ke titik c. Karena mereka tahu, bahwa jarak titik ac

lebih pendek dari jarak abc. Dari sini, ada hubungan antara ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Dari penggabungan aksioma dan pengalaman ini, orang dapat memberikan kepastian yang mutlak, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

b. Membuktikan secara konvensional.

Disini membuktikan juga memberikan suatu kepastian, akan tetapi bukan kepastian yang bersifat mutlak, akan tetapi bersifat nisbi atau relatif. Dan mempunyai tingkatan-tingkatan (*graden*) sebagai berikut :

- 1) Tingkat kepastian yang paling rendah, didasarkan kepada *intuitif* atau bisikan kalbu atau ilham saja. Orang Perancis menamakan ini "*conviction intime*". Dalam hal ini tidak dapat diberikan argumentasi secara logika, karena berdasarkan bisikan kalbu atau ilham saja, ataupun berdasarkan perasaan saja.
- 2) Kita kenal kepastian yang berdasarkan pertimbangan akal atau "*conviction raisonnee*". Pertimbangan yang berdasarkan akal ini, untuk orang yang satu dengan yang lainnya, dengan sendirinya akan dapat sangat berbeda. Karena bergantung dari subyeknya masing-masing yang menggunakan akalnya, atau rasionya. Mr. Asser memberikan contoh : untuk orang-orang awam cara

memberikan kepastian terhadap suatu jembatan yang melintas sungai sudah cukup kalau ada pernyataan dari yang berwajib, bahwa jembatan tersebut sudah layak dapat dilalui oleh kendaraan umum. Bagi Pemerintahan Kotapraja, kepastian itu akan diperoleh setelah mendengarkan pernyataan dari dua orang insinyur ahli jembatan, bahwa jembatan tersebut laik pakai (*goedkeuren*) dan karenanya dapat dilalui oleh kendaraan umum.

- 3) Membuktikan secara yuridis. Membuktikan secara yuridis untuk hakim ialah: memberikan kepada hakim yang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya itu, alasan-alasan hukum yang cukup, sehingga berdasarkan hukum yang berlaku, hakim ada kepastian untuk memberikan akibat hukum terhadap perkara tersebut. Dalam praktek, memberikan akibat hukum itu dikatakan memberi suatu putusan hakim.

Menurut R. Subekti, bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan¹²⁾

¹²⁾ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975) hal 9

Menurut Sudikno Mertokusumo “membuktikan” mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : ¹³⁾

- 1) Kata membuktikan dalam arti logis, mengandung arti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak, yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang, dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu, pembuktian tersebut berlaku bagi setiap orang. Di sini, aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
- 2) Kata membuktikan dalam arti konvensional. Di sinipun kata membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang berarti tingkatan-tingkatan :

¹³ Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1988) hal. 107

- a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat *intuitif* dan disebut dengan *conviction intime*.
- b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, oleh karena itu disebut dengan *conviction raisonnee*.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini, hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis, tidak menuju pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini, dimungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti yuridis, berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum, adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat,

atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.¹⁴⁾

Pembuktian menurut Riduan Syahrani, adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, oleh pihak yang berperkara kepada hakim yang memeriksa suatu perkara, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁵⁾

Sedangkan Bachtiar Effendie, menyatakan bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, oleh pihak yang berperkara kepada hakim dalam persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya.¹⁶⁾

Dari beberapa rumusan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan. Pembuktian bertujuan untuk berusaha memberikan

¹⁴⁾ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung : Mandar Maju, 1989) hal. 20

¹⁵⁾ Riduan Sahrani Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Jakarta : Pustaka Kartini, 1988) hal. 55

¹⁶⁾ Bahtiar Effendie, et. al; Surat Gugat dan Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Bandung : PT.Citra Aditia Bakti, 1991) hal. 50

kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa kepada hakim. Fakta hukum tersebut dapat berupa peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban perdata, baik yang bersifat perorangan, kebendaan atau campuran.

2. Teori Pembuktian

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, sehingga timbul pertanyaan sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang. Sehubungan dengan hal ini, dikemukakan teori tentang pembuktian sebagai berikut : ¹⁷⁾

a. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

b. Teori Pembuktian Negatif

Berdasarkan teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi dalam bentuk larangan kepada hakim, untuk melakukan sesuatu yang

¹⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 112

berhubungan dengan pembuktian. Jadi dalam hal ini hakim dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR).

c. Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Jadi dalam hal ini hakim diwajibkan, tetapi dengan adanya syarat. (Pasal 165 HIR).

Teori pembuktian lainnya dikemukakan oleh Bachtiar Effendie yang menyatakan, terdapat tiga teori tentang pembuktian yang meliputi: ¹⁸⁾

a. Teori Pembuktian Bebas

Artinya hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara, baik alat-alat bukti yang disebutkan undang-undang maupun yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Dalam hal ini, hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh yang berperkara, jadi harus memberikan putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Teori ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu :

1) Teori Pembuktian Negatif

¹⁸⁾ Bachtiar Effendie Op. Cit., hal. 53

Berdasarkan teori ini, hakim terikat dengan larangan undang-undang dalam penilaian suatu alat bukti tertentu.

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim dalam hal ini, terikat dengan perintah undang-undang dalam memberikan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

c. Teori Pembuktian Gabungan

Artinya hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian, misalnya hakim bebas menilai suatu alat bukti permulaan, sehingga hakim masih memerlukan adanya sumpah tambahan. Bila sumpah tambahan dilakukan, maka hakim terikat menilainya, apabila tidak disertai sumpah tambahan, maka hakim bebas menilai alat bukti permulaan itu.

3. *Beban Pembuktian*

Perihal pembuktian menimbulkan masalah beban pembuktian, yang meliputi :

- a. Siapa yang harus membuktikan (Pasal 163 HIR) ;
- b. Apa yang harus dibuktikan:
 - a) Tergantung dalil penggugat dan jawaban tergugat;
 - b) Dipecahkan dengan teori-teori tentang beban pembuktian.

c. Bagaimana cara membuktikan:

Yaitu dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 164, 153, 154, 138 HIR, dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950).

Mengenai siapa yang harus membuktikan, dan apa yang harus dibuktikan, undang-undang telah mengaturnya seperti yang tercantum dalam Pasal-Pasal berikut ini :¹⁹⁾

a. Umum

- Pasal 252 KUHPerdara, pada prinsipnya mengatakan bahwa apabila seorang ayah dapat membuktikan ketidakabsahan anaknya, ia dapat mengingkarinya.
- Pasal 288 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa dalam menyelidiki siapakah ibu seorang anak luar kawin, si anak harus membuktikan bahwa ia adalah yang dilahirkan oleh si ibu.
- Pasal 287 KUHPerdara, pada intinya menerangkan tentang anak luar kawin hasil kejahatan (Ps 285, 288, 294, 332 KUHP) dapat dinyatakan sebagai anak dari si bersalah atas tuntutan yang berkepentingan.

¹⁹⁾ BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, *Hukum Acara Perdata, Membaca dan Mengerti HIR* (Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP, 1994) hal. 89

- Pasal 489 KUHPdata, menjelaskan tentang barang siapa menuntut suatu hak yang merupakan peralihan dari seorang tak hadir kepadanya, wajib membuktikan bahwa si tak hadir itu masih hidup, pada saat hak tersebut jatuh kepadanya.

b. Beban pembuktian dibalik:

- Pasal 1394 KUHPdata, menerangkan bahwa segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu dalam jangka yang lebih pendek, dengan adanya tiga surat tanda pembayaran berturut-turut, maka terbit suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang terdahulu telah dibayar lunas, kecuali bila dibuktikan sebaliknya.
- Pasal 1965 KUHPdata, yang pada prinsipnya menjelaskan tentang itikad baik yang selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.

c. Persangkaan Undang-undang :

- Pasal 540 KUHPdata, pada prinsipnya menjelaskan bahwa musnahnya sebuah kapal yang berlayar setelah kecelakaan dianggap disebabkan karena kecelakaan tersebut, kecuali bila dibuktikan sebaliknya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Pasal 1394 KUHPerdara, menjelaskan bahwa segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu dengan jangka yang lebih pendek dengan adanya tiga surat tanda pembayaran berturut-turut, maka terbit suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran terdahulu telah dibayar lunas, kecuali bila dibuktikan sebaliknya.
- Pasal 1965 KUHPerdara pada intinya menjelaskan tentang itikad baik yang selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.

Asas beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR serta Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara. Di samping Pasal-Pasal tersebut, masih terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang lebih tegas pengaturannya, seperti yang tercantum dalam bunyi Pasal sebagai berikut:

- Pasal 533 KUHPerdara :

"Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang mengemukakan adanya itikad buruk harus membuktikannya".

- Pasal 535 KUHPerdara:

"Kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya".

- Pasal 1244 KUHPerdara:

"Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya wanprestasi".

Di luar ketentuan-ketentuan khusus yang disebutkan di atas, hakim hanya berpedoman pada asas umum yang tercantum dalam Pasal 163 HIR serta Pasal 283 dan Pasal 1865 KUHPerdara.²⁰⁾

Disamping itu oleh BPH. Hapsoro Hadiwidjojo dinyatakan bahwa, di dalam Hukum Acara Perdata dikenal pula asas “Beban Pembuktian Mengandung Resiko”, yang menerangkan bahwa barang siapa diwajibkan untuk membuktikan, apabila berhasil membuktikan belum tentu menang, namun jika tidak berhasil membuktikan berarti kalah.²¹⁾

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim.²²⁾

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka. Berdasarkan teori ini dikatakan bahwa barang siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum dari teori ini adalah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negativa non sunt probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak; sekalipun pembuktiannya mungkin, hal tersebut tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori ini telah ditinggalkan.

²⁰⁾ Sudikno Mertokusukmo, *Op. Cit.*, hal. 117

²¹⁾ BPH Hapsoro Hadidjijoyo, *Op. Cit.*, hal. 85

²²⁾ Sudikno Mertokusukmo, *Op. Cit.*, hal. 115

b. Teori hukum subyektif

Menurut teori ini, suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan barang siapa yang mengemukakan atau mengakui sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini, penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan, dibedakan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, menghalangi timbulnya hak, dan peristiwa khusus yang membatalkan hak. Penggugat berkewajiban, membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan, tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa khusus yang bersifat menghalangi dan yang bersifat membatalkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya, bahwa jika penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan, maka pengugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan. Sedangkan apabila tergugat menyangkal gugatan penggugat, dengan menyatakan misalnya terdapat cacat pada persesuaian kehendak, atau hak penggugat itu batal, karena telah dilakukan pembayaran, maka tergugatlah yang harus membuktikannya. Teori ini berdasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata. Dalam praktek,

teori ini sering menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dibatasi, dengan memberi kelonggaran pada hakim untuk mengadakan pengalihan beban pembuktian.

c. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim, agar menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Siapa yang misalnya, harus mengemukakan adanya suatu persetujuan harus mencari dalam Undang-undang (hukum obyektif), tentang apa syarat sahnya persetujuan (Pasal 1320 KUHPerdara) dan kemudian memberikan pembuktiannya. Tidak perlu dibuktikan misalnya adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal tersebut tidak disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adanya cacat kehendak tersebut, harus dibuktikan oleh pihak lawan. Hakim yang bertugas menerapkan hukum obyektif, pada peristiwa yang diajukan para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif itu ada. Jadi atas dasar isi hukum obyektif yang diterapkan, dapat ditentukan beban pembuktian. Teori ini bersifat formalistis.

d. Teori Hukum Publik

Berdasarkan teori ini dikatakan, bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan, merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori Hukum Acara

Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim, merupakan asas pembagian pembuktian berdasarkan teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak, membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Jika penggugat menggugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah jika penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu, dan bukanlah tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat. Jika tergugat mengemukakan, bahwa ia membeli sesuatu

dari penggugat, tetapi batal karena kompensasi, maka tergugat harus membuktikan, bahwa ia mempunyai tagihan pada penggugat. Penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan, bahwa ia tidak mempunyai hutang pada tergugat. Sudah sepatutnya jika yang harus dibuktikan itu, hanyalah hal-hal yang positif, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukan tidak adanya suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang, tidak perlu membuktikan, bahwa ia berhak atas barang tersebut. Sebaliknya siapa yang hendak menuntut suatu barang dari orang, lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut.

Sedangkan BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, memberikan teori tentang beban pembuktian sebagai berikut : ²³⁾

a. Teori Subjektif

Menyatakan bahwa, pihak yang harus membuktikan adalah kedua belah pihak.

b. Teori Objektif

Menyatakan bahwa, masing-masing pihak membuktikan menurut hukum objektif.

Pihak penggugat membuktikan, apa yang menurut hukum objektif menimbulkan hak padanya. Tergugat menimbulkan hal-hal yang

²³⁾BPH Hapsoro Hadiwidjojo, *Op.Cit.*, hal. 87

meniadakan atau menghapuskan hal-hal yang oleh penggugat disebut sebagai dasar haknya.

c. Teori Kepantasan

Menyatakan bahwa yang membuktikan adalah pihak yang paling mudah untuk menunjukkan bukti / pembuktian.

d. Tidak diperlukan adanya teori mengenai siapa yang harus membuktikan, melainkan dengan ditentukan berdasarkan hal-hal :

- Dimana penggugat yang terlebih dahulu memulai mengajukan gugatan, jika dalilnya disanggah, maka ia harus membuktikan kebenaran gugatannya.
- Jika di dalam sanggahan tersebut, tergugat mengajukan dalil / posita, maka ia harus membuktikannya pula.

4. Alat-alat Bukti

Alat-alat bukti adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara perdata di depan sidang pengadilan.²⁴⁾

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan, berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang

²⁴⁾ Bachtiar Effendie, *Op.Cit.*, hal. 57

saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, Pasal 1866 KUHPerdata), ialah terdiri dari alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, dan sumpah.

Alat-alat bukti lain, yang disebutkan undang-undang ialah pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg).²⁵⁾ Di samping itu masih terdapat alat-alat bukti lain, yang tidak disebutkan Undang-undang, seperti foto, klise (film negatif), rekaman dalam casette tape / video / film, dan lain sebagainya.²⁶⁾

Selain hal tersebut di atas, BPH. Hapsoro Hadiwidjojo mengemukakan bahwa disamping alat-alat bukti yang disebutkan pada Pasal 164, Pasal 153, serta Pasal 154 HIR, masih terdapat alat-alat bukti lain, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 138 HIR, mengenai tulisan-tulisan yang dipegang oleh penyimpanan umum, seperti misalnya akta, berkas perkara, atau daftar yang ada pada notaris, pegawai catatan sipil, panitera, dan lainnya. Di samping itu, termasuk pula alat bukti yang tercantum dalam Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950 yaitu pengetahuan hakim.²⁷⁾

²⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 160-161

²⁶⁾ Bachtiar Effendie *Op Cit.*, hal. 58

²⁷⁾ BPH. Hapsoro Hadiwidjojo *Op.Cit.*, hal. 89

Berdasarkan sifatnya, alat-alat bukti tersebut menurut Paton, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu terdiri dari :²⁸⁾

- a. Alat bukti yang bersifat oral, seperti keterangan lisan dari saksi / ahli, pengakuan pihak berperkara, dan sumpah;
- b. Alat bukti yang bersifat documentary, misalnya surat;
- c. Alat bukti yang bersifat material atau disebut juga dengan *Demonstrative Evidence*, meliputi barang fisik lainnya, selain dokumen.

B. Pembuktian Dengan Akta

1. Pengertian Akta

Akta merupakan salah satu bentuk dari alat bukti tertulis / surat. Menurut Pitlo suatu akta adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²⁹⁾

Sudikno Mertokusumo, memberikan pengertian tentang Akta yaitu sebagai surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi

²⁸⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 119

²⁹⁾ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terj. M. Isa Areif (Jakarta : PT. Intermasa 1986) hal. 52

dasar daripada suatu hak atau perkara, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁰⁾

Disamping pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang dalam peraturan Perundang-undangan sering dijumpai perkataan akta, yang maksudnya sama sekali bukanlah “surat”, melainkan perbuatan. Hal ini dijumpai misalnya pada Pasal 108 KUHPerdato yang berbunyi :³¹⁾

Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu, atau memindahtangkannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam “akta” atau dengan izin tertulis dari suaminya.

Bila diperhatikan dengan seksama dan teliti, maka penggunaan kata “akta” dalam ketentuan undang-undang di atas, adalah tidak tepat, kalau diartikan surat yang diperuntukkan sebagai alat bukti.

Menurut R. Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdato tersebut di atas, bukanlah berarti surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti “perbuatan”.³²⁾

³⁰⁾ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, hal. 120

³¹⁾ Victor. M. Situorang dan Carmentyna Sitanggang, *Op. Cit.*, hal.26

³²⁾ R. Subekti *Op.Cit.*, hal. 29

Djoko Soepadmo mengemukakan bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia atau Burgerlijk Wetboek (B.W.). Kata-kata akta, seringkali dipakai untuk pengertian yang artinya identik dengan kata perbuatan hukum atau *rechtshandeling*. Misalkan dalam Pasal 2, 114, 117, 1117 dan Pasal 1448 B.W. kalau kita melihat dalam buku terjemahan B.W. tersebut dalam bahasa Indonesia, ada yang menterjemahkan dengan “akta” saja dan ada yang menterjemahkan dengan kata “perbuatan hukum”. Tetapi kalau terdapat kata akta dalam Pasal-Pasal itu, hendaknya dibaca atau diartikan perbuatan hukum. Misalkan dalam Pasal 144 B.W., disana dijelaskan bahwa: jika sang suami berhalangan karena sebab apapun juga, hakim pengadilan boleh mengizinkan kepada isteri itu, untuk menghadap di muka hakim, membuat perjanjian-perjanjian menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala macam akta lainnya. Disini akta itu harus diartikan “perbuatan hukum”. Bukan membuat surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat pembuktian saja, tetapi juga dapat melakukan perbuatan hukum lainnya. Akta di Pasal-pasal tersebut harus dianggap, berasal dari kata-kata *action* atau *acts*. Jadi singkatnya dalam B.W., kata akta ada 2 macam : yang satu berarti suatu surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat pembuktian, dan yang lainnya berarti perbuatan hukum atau *act* atau *action* atau perbuatan saja.³³⁾

³³⁾ Djoko Soepadmo *Op., Cit.*, hal. 489

Jadi dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan akta adalah :

- a. Perbuatan handling / perbuatan hukum (*rechtshandeling*), sebagai pengertian yang luas, dan
- b. Suatu tulisan, yang dibuat untuk dipakai / digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian akta dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka yang penulis maksudkan dengan akta dalam pembahasan ini, adalah akta dalam arti surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

Dengan demikian untuk dapat dikatakan, bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu, yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula, baru dapat disebut akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi, supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

- 1) Ditandangi, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta, tercantum dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Fungsi tandatangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.³⁴⁾ Menurut Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 Rbg, dan Pasal 1 Stb. 1867 No. 29; sidik jari, cap jari, cap jempol disamakan

³⁴⁾ Sudikno Mertokusumo. *Op., Cit.*, hal. 120

dengan tandatangan, apabila dikuatkan dengan suatu keterangan tertanggal, oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Disamakan pula suatu facsimile dari tandatangan atau cap tandatangan, apabila dibubuhkan oleh yang berwenang atau yang diberi wewenang.³⁵⁾

- 2) Surat itu harus membuat peristiwa, yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.

Sesuai dengan peruntukkan, sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu dibuat, maka jelas, bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan, yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu, dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi, dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu disebut dalam surat itu, dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali, tidak memuat suatu peristiwa hukum, yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.³⁶⁾

³⁵⁾ Bachtiar Effendie. *Op., Cit.*, hal. 60

³⁶⁾ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Op. Cit.*, hal. 27

3) Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta, adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu bukti surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dapat dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang, untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat secara lisan, adalah suatu akta, karena ia dibuat untuk pembuktian. Demikian juga H.R. tanggal 14 April 1961 (N.Y.1961 : 446). Suatu surat ulang tahun, tidaklah dibuat untuk pembuktian. Diantara keduanya terdapat daerah kesangsian (*Terren van het dubin*).³⁷⁾

2. Fungsi Akta

Akta mempunyai bermacam-macam fungsi di dalam hukum. Fungsi itu dapat berupa :

a. Fungsi Formal

Adanya akta merupakan syarat formal, untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, misalnya :

- Adanya akta di bawah tangan, merupakan syarat minimal untuk menyatakan adanya perjanjian utang-piutang (Pasal 1767 KUHPerdara), dan sebagainya.

³⁷⁾ A. Pitlo. *Op.Cit.*, hal 53

- Adanya akta otentik merupakan syarat, untuk menyatakan adanya :
pemberian hipotik (Pasal 1171 KUHPerdara), hibah (Pasal 1682 KUHPerdara), dan sebagainya.

Jadi, jika tidak terdapat akta, maka tidak ada pula perbuatan hukum.

- b. Fungsi alat bukti atau sebagai alat bukti satu-satunya (*probationis causa*), artinya sejak semula dibuatnya, akta itu untuk dipakai sebagai alat bukti oleh para pihak, atau sebagai alat bukti satu-satunya menurut undang-undang.

Contoh : Pasal 150 KUHPerdara.

3. *Kekuatan Pembuktian Akta*

Kekuatan pembuktian akta, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : ³⁸⁾

a. *Kekuatan Pembuktian Lahir*

Artinya, suatu surat yang secara lahir tampak seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan otot seperti akta, diperlukan sebagai akta, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dasarnya adalah kenyataan lahir.

b. *Kekuatan Pembuktian Formil*

Artinya, secara formil memang benar, ada pernyataan di dalam akta itu.

Kekuatan pembuktian formil ini, didasarkan atas benar tidaknya ada

³⁸⁾ Bachtiar Effendie, *Op., Cit.*, hal. 61

pernyataan, oleh yang bertandatangan di bawah akta itu. Dan juga memberikan kepastian. Tentang peristiwa, bahwa pejabat dan para pihak menyatakan, dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Artinya, secara materiil, pernyataan di dalam akta itu adalah benar. Dasarnya adalah hukum.

4. Jenis Akta

Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi : pembuktian dengan tulisan, dilakukan dengan tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan.

Dari bunyi Pasal ini, maka akta itu dapat dibedakan atas :

- a. Akta otentik (*autentic acta*) ;
- b. Akta di bawah tangan (*onderhands acta*) ;

Ad. a. Akta Autentik.

Mengenai akta autentik, diatur dalam Pasal 165 HIR. yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg., yang berbunyi : ³⁹⁾

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu,

³⁹⁾ Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Reglement Indoesia yang diperbaharui*. (Jakarta : PT. Lehher Baru-Van hoeve, 1989) hal.723

merupakan bukti yang lengkap antara para, pihak dari para ahli warisnya, dan mereka yang mendapat hak dari padanya, tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini, hanya diberitahukan itu, berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas, memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik, dijumpai pula dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Menurut G.H.S. Lumbang Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :⁴⁰⁾

- 1) Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum ;
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ;
- 3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

⁴⁰⁾ G.S.H. Lumbang Tobing., *Op., Cit.*, hal. 42

Ad. 1) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat yang diberi wewenang, berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti notaris, panitera, jurusita, hakim, pegawai catatan sipil, kepala daerah dan lain-lain. Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.⁴¹⁾

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa akta otentik itu dapat dibedakan atas :

- a) Akta yang dibuat pejabat (*ambtelijke akten, procesverbaal acta, acta relaas*) ;
- b) Akta yang dibuat dihadapan (*aktenoverstaan*) pejabat oleh para pihak yang memerlukannya (*partij akten*).

Termasuk akta para pihak (*partij akten*) misalnya akta jual beli, akta sewa menyewa. Yang diperbuat oleh para pihak, di hadapan notaris. Apakah perbedaan antara *akta relaas* (akta berita acara) dengan akta para pihak (*partij akten*), dimana keduanya merupakan akta otentik.

Perbedaan antara kedua akta itu antara lain :

⁴¹⁾ G.H.S. Lumbang Tobing., hal.44

- 1) Akta relaas (akta berita acara) dibuat oleh pejabat, sedang akta para pihak dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan.
- 2) Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedang pada akta relaas, pejabat pembuat akta itu, kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.
- 3) Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedang akta relaas tanda tangan demikian, tidak merupakan keharusan.
- 4) Akta para pihak berisikan keterangan, yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedang akta relaas, berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
- 5) Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh, bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi akta para pihak, dapat diganggu tanpa menuduh kepalsuan akta itu.

Sehubungan dengan perbedaan akta relaas dan akta para pihak ini, G.H.S. Lumban Tobing menulis sebagai berikut : ⁴²⁾

“Perbedaan diantara kedua golongan akta itu dapat dilihat dari bentuk akta-akta itu. Keharusan tandatangan pada “akta partij”

Undang-undang mengharuskan, bahwa akta-akta partij, dengan diancam akan kehilangan otensitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani para pihak yang bersangkutan atau setidaknya dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu, oleh para pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf, atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh notaris dalam akta itu, dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan (*Surrogaat tanda tangan*). Dengan demikian untuk akta partij, penandatangan oleh para pihak merupakan “keharusan” (lihat Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris). Untuk “akta pejabat” tandatangan “tidak merupakan keharusan” bagi otensitas akta itu.

Untuk akta relaas tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan berita acara rapat pemegang saham dalam

⁴²⁾ Ibid. hal. 44

perseroan terbatas, orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup notaris menerangkan di dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu, dan dalam hal itu tetap merupakan akta otentik.⁴³⁾

Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain adalah :

- (a) Tanggal dari akta itu ;
- (b) Tanda tangan yang ada pada akta itu ;
- (c) Identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten) ;
- (d) Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu, adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak yang bersangkutan sendiri.⁴⁴⁾

Ad. 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai bentuk dari akta otentik itu, sebenarnya tidak ditentukan secara tegas, dalam undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah “isi” dari akta otentik itu.

⁴³⁾ Ibid. hal. 45-46

⁴⁴⁾ Ibid.

akta-akta otentik yang dibuat oleh para pejabat pembuat akta, menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi dan lain-lain, memang mempunyai bentuk yang beragam, tetapi mengenai bentuk isi sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi atau apa-apa yang harus dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan mana maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk (vorm) yang serupa.⁴⁵⁾

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, mengenai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta, di bidang hukum perdata berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, bentuknya tidak secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi dan cara-cara penulisan akta itu, ditentukan dengan tegas dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 nomor 3), dengan ancaman kehilangan sifat otentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.⁴⁶⁾

⁴⁵⁾ Victor M. Sitomurang dan Cormentya Sitomurang. *Op. Cit.*, hal. 33

⁴⁶⁾ *Ibid.*, hal. 33

Ad. 3) Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Untuk mengetahui pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik atau yang dihadapannya dapat dibuat akta otentik, kita melihat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 nomor. 3) yang isinya sebagai berikut : ⁴⁷⁾

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu, oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Dari ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut di atas, jelas bahwa untuk akta otentik di bidang keperdataan (berdasarkan hukum perdata), notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya, baik akta itu diharuskan oleh permintaan orang-orang yang berkepentingan, kecuali untuk akta-akta tertentu yang secara tegas disebut dalam peraturan perundangan, bahwa selain notaris, ada lagi pejabat lain, yang berwenang membuatnya, atau untuk pembuatan akta otentik tertentu, pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Jadi wewenangnya yang

⁴⁷⁾ G.H.S. Lumban Tobing, *Op,Cit.*, hal. 31

bersifat umum, sedang wewenang pejabat lain yang bukan notaris itu, adalah bersifat khusus atau bersifat pengecualian.

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya antara lain :

- (a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
- (b) Berita Acara tentang kelalaian pejabat menyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdara);
- (c) Berita Acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdara);
- (d) Akta Protes Wesel dan Cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHPerdara);
- (e) Akta Catatan Sipil (Pasal 4 KUHPerdara).

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai 4 tersebut di atas, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya), sedang yang disebut pada angka 5, notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai kantor catatan sipil.⁴⁸⁾

Wewenang notaris ini meliputi 4 (empat) hal, yaitu :⁴⁹⁾

⁴⁸⁾ Ibid, hal. 34 – 35

⁴⁹⁾ Ibid. hal. 43

- (a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu ;
- (b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;
- (c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat ;
- (d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Jika suatu akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang tidak berwenang untuk itu, maka akta itu bukanlah akta otentik, melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, jika (para) pihak telah menandatangani, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang isinya sebagai berikut : ⁵⁰⁾

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya dalam pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, jika ia ditandatangani oleh para pihak.

⁵⁰⁾ Victor M. Situmorang dan Cormontyna Sitanggang, *Op., Cit.*, hal. 34

Angka 2. Akta di bawah Tangan

Akta di bawah tangan menurut Sudikno Mertokusumo, adalah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.⁵¹⁾

Sedangkan menurut Riduan Syahrani, yang dimaksud dengan akta di bawah tangan, adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa bantuan pejabat umum.⁵²⁾

Akta di bawah tangan tidak diatur dalam HIR (untuk Jawa dan Madura), tetapi diatur secara khusus, dalam suatu ordonansi tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, yang termuat dalam Staatblad 1867 No. 29. Sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Rbg Pasal 286 hingga Pasal 305. Dalam KUHPerdara, akta di bawah tangan diatur mulai Pasal 1874 hingga Pasal 1880 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1 Stb. 1867 No. 29 / 291 Rbg / 1871 KUHPerdara, surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat, semuanya termasuk dalam pengertian akta dibawah tangan.⁵³⁾

⁵¹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit.*, hal. 127

⁵²⁾ Riduan Syahrani, *Op, Cit.*, hal. 62

⁵³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit.*, hal. 127

Khusus mengenai surat pengakuan hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani, atau setidaknya orang yang menandatangani itu harus menulis di bawahnya dengan tangannya, yang menyebut dengan huruf jumlah atau besarnya atau banyak barang yang harus dibayar. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 4 Stb. 1867 No. 29 / 291 Rbg / 1878 KUHPperdata.

Dengan adanya ketentuan seperti di atas ini, undang-undang bermaksud, memberi perlindungan terhadap orang yang membubuhkan tanda tangannya di atas secarik kertas kosong (blanko), dan untuk menghindari pengisian blanko kosong tersebut, oleh orang lain secara sewenang-wenang dengan suatu pengakuan adanya hutang sejumlah uang.⁵⁴⁾

Bilamana ketentuan tersebut tidak diindahkan, di mana tandatangan seseorang pada kertas blanko diisi oleh orang lain dengan pengakuan hutang sejumlah uang, maka apabila pengakuan hutang tersebut diingkari (meskipun tandatangan diakui), tulisan tersebut hanya dapat diterima, sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Artinya, tidak merupakan akta yang mempunyai kekuatan mengikat

⁵⁴⁾ Subekti, *Op, Cit.*, hal 96

seperti lazimnya berlaku terhadap suatu akta yang tandatangannya diakui.⁵⁵⁾

Menurut G.H.S. Lumbang Tobing, perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta di bawah tangan ialah :⁵⁶⁾

- a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi Pasal 1 P.J.N. yang mengatakan, menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya), sedang mengenai tanggal akta di bawah tangan tidak selalu demikian ;
- b. Grosse dari akta otentik, dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan, tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- c. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan, lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Disamping itu, masih ada lagi perbedaan-perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan seperti :⁵⁷⁾

- a. Akta otentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat, dan harus mengikuti bentuk dan formalitas yang ditentukan

⁵⁵⁾ Rinduan Syahrani *Op. Cit.*, hal. 63

⁵⁶⁾ G.H.S. Lumbang Tobing, *Op. Cit.*, hal. 38

⁵⁷⁾ Ibid

dalam undang-undang, sedang akta di bawah tangan tidak demikian ;

- b. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas "*acta publica probant ipsa*", sedang akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir ;
- c. Dan lain-lain.

C. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Kekuatan berasal dari kata kuat, secara yuridis oleh Boedi Harsono diberikan arti : Bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, isi formil dan materiil yang tercantum dalam akta notaris, diterima sebagai akta otentik yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa pengadilan.⁵⁸⁾

Pengadilan disini diartikan : sebagai dewan / badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara, dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai perseketaan hukum, pelanggaran hukum dan sebagainya.⁵⁹⁾

Kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian juga akta notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-

⁵⁸⁾ Pengertian kekuatan dalam hal ini adalah sebagai analogi dari pengertian kekuatan pembuktian sertifikat yang juga akta otentik, Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta : Djambatan, 2000) hal. 571

⁵⁹⁾ J. C.T. Simorangkir et. al., *Kamus Hukum* (Jakarta : Aksara Baru 1971) hal. 124

undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah, terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian, untuk apa menugaskan kepada mereka untuk “memberikan keterangan dari semua apa yang mereka saksikan di dalam menjalankan jabatan mereka” atau untuk “merelativir” secara otentik, semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka itu dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu.⁶⁰⁾

a. *Ada Tiga Macam Kekuatan Pembuktian Dari Akta Notaris* :⁶¹⁾

1) *Kekuatan pembuktian lahiriyah*

Akta otentik membuktikan sendiri tentang keabsahannya, seperti yang disebut (dalam istilah latin) “*acta probant sese ipsa*”.

Tentang asas ini, tidak disebut-sebut oleh pembentuk undang-undang. Meskipun demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan undang-undang sendiri, atau berdasarkan hukum positif kita, tidak ada yang ragu-ragu bahwa hukum positif kita, menganut azas *acta probant sese ipsa*.

⁶⁰⁾ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 54

⁶¹⁾ Djoko Soepadmo, *Op. Cit.*, Hal. 517

Masih menurut Djoko Soepadmo, ini berarti, bahwa apabila suatu akta dipertunjukkan kepada kita, khususnya kepada hakim dan akta itu lahiriyah atau *uitweriding* berupa akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka terhadap akta itu, berlaku atau harus dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Ini berarti, bahwa beban pembuktian terletak kepada siapa, yang menganggap bahwa akta itu bukan akta otentik. Beban pembuktian ini, terikat pada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 148 R.v. (Pasal 138 HIR-164 Brv). Jadi cara pembuktiannya berat. Baik berdasarkan ilmu pengetahuan maupun berdasarkan praktek hukum yang berlaku, maka hakim dan siapapun harus menganggap bahwa akta itu adalah otentik.

Begitu juga berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan praktek, kekuatan pembuktian secara lahiriyah ini (*uitwendige bewijskracht*) berlaku terhadap siapapun, pada setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja.

Jadi dalam hal pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah melalui "*valsheids procedure*". Yang menjadi persoalan, bukan isi dari akta itu atau wewenang dari pejabat (notaris) itu, akan tetapi semata-mata, hanya mengenai tanda tangan si pejabat (notaris)

itu. Siapa yang tidak menggugat sahnya tanda tangan dari pejabat itu, akan tetapi menggugat kewenangan / kompetensinya (misalnya yang membuat akta itu bukan notaris atau membuat akta di luar wilayah jabatannya), bukan menuduh “akta itu palsu”, sehingga jika terjadi seperti itu, dalam hal ini tidak dapat ditempuh secara “*valsheidprocedure*”.⁶²⁾

Sebagai alat bukti, maka keistimewaan dari akta otentik menurut Pasal 1875, adalah terletak pada kekuatan pembuktian lahiriyah ini. Pada akta di bawah tangan, pembuktian secara lahiriyah ini tidak kita dapati.⁶³⁾

2) *Kekuatan Pembuktian Secara Formil dari Akta Otentik*

Dalam arti formil, akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat oleh pejabat, di dengar dan dikerjakan. Yang dibuktikan ialah, tentang kebenaran dari apa yang diterangkan, dilihat didengar dan dikerjakan oleh pejabat dalam menjalankan tugasnya. Yang dipastikan tentang kebenarannya ialah, juga menyangkut tentang penanggalan dari akta, tempat dimana akta dibuat, dan tentang keaslian atau kebenaran tentang tanda tangan.⁶⁴⁾

Secara singkat menurut Wawan Setiawan: “benar mereka berkata, belum tentu mereka berkata benar”.⁶⁵⁾

⁶²⁾ Wawan Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 64

⁶³⁾ Djoko Soepadmo, *Op. Cit.*, hal. 517

⁶⁴⁾ Ibid. hal 578

⁶⁵⁾ Wawan Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 65

Menurut Wawan Setiawan, pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian formal ini, juga berlaku pembatasan mengenai "*valsheidsprocedure*". Mungkin terjadi :⁶⁶⁾

- Siapa menyatakan bahwa akta itu, memuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti menuduh, bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu, misalnya ada bagian kalimat yang hilang atau diganti dengan perkataan lain, atau ada penambahan kata-kata.

Hal demikian itu berarti menuduh keterangan si pejabat itu palsu (*materiele valsheid*). Untuk itu harus ditempuh "*valshiedsprocedure*" (Pasal 148 sub 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata).

- Siapa menuduh, bahwa akta memuat "keterangan" dari pihak – pihak yang sesungguhnya tidak ada diberikan. Hal itu ada dua kemungkinan :

Pertama, ia dapat langsung tidak mengakui dan membuktikan bahwa tanda tangan yang terdapat di bagian bawah dari akta itu bukan tanda tangannya artinya ia tidak pernah menanda tangani akta itu, akan tetapi tanda tangan pada akta itu, adalah tanda tangan orang lain. Karenanya terjadi pemalsuan dan boleh dibuktikan melalui "*valsheidprocedure*" (pasl 148 KUA Perdata). Kedua, ia dapat mengatakan bahwa pejabat

⁶⁶⁾ Ibid., hal. 66

(notaris) melakukan kekhilafan / kesalahan, dengan menyatakan dalam akta itu bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang berasal dari padanya.

Dalam hal ini tidak menuduh tanda tangan itu palsu akan tetapi menuduh, bahwa keterangan dari notaris itu tidak benar (*intellectual valseheid*) suatu pengertian yang sama sekali tidak kaitannya dengan "*valseheidprocedure*". Dalam hal demikian, tidak ada pemalsuan, melainkan suatu kekhilafan, yang mungkin tidak disengaja, sehingga tuduhan itu, bukan terhadap kekuatan pembuktian formal, akan tetapi terhadap kekuatan pembuktian, material dari keterangan notaris itu. Untuk pembuktiannya dapat dipergunakan segala alat pembuktian yang dipergunakan menurut hukum.

Catatan :

Jika dua buah tanda tangan atau lebih, tidak sama akan tetapi ditanda tangani oleh orang yang sama, itu TIDAK palsu.

Sebaliknya, dua buah tanda tangan persis sama, akan tetapi ditanda tangani oleh orang yang TIDAK sama, maka satu diantaranya tanda tangan atau seluruhnya adalah PALSU.

Maka yang harus dibuktikan, bukanlah bentuk dari tandatangan, misalnya diperiksa di laboratorium dan sebagainya, akan tetapi siapa penandatangan (yang membubuhkan tandatangannya itu).

3) *Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Otentik*

Akta itu dibuat haruslah berdasarkan kepada kenyataan yang benar, dan berdasarkan kebenaran yang nyata. Artinya apa yang menjadi isi dari akta itu, bukan/tidak hanya kenyataan secara maujud, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh atau meminta untuk diadakan/untuk dibuatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap/bagi dirinya.⁶⁷⁾

Menurut Wawan Setiawan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian material sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870, dan Pasal 1871 serta pasal 1975 KUHPdata ; yaitu antara para pihak yang bersangkutan, para ahli waris dan para penerima hak mereka ; akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu. Sebagai misal :⁶⁸⁾

a. Para pendiri perseroan terbatas, menyetujui dan sebagaimana

⁶⁷⁾ Wawan Setiawan, *Op. Cit.*, hal.67

⁶⁸⁾ *Ibid.*, hal. 67

Ternyata dalam akta pendirian PT. Itu, bahwa modal dasarnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan yang diambil/ditempatkan sebesar 25 % atau Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan masing-masing pendiri yang berjumlah lima orang (harus) menyeter Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) paling lambat pada saat anggaran dasar mendapat pengesahan/persetujuan yang berwenang.

Akta itu membuktikan secara material, baik penegasan dari orang-orang yang mendirikan PT. Itu, maupun jumlah nilai saham atau modal dari masing-masing yang harus disetorkan ;

- b. Dalam akta jual beli, antara penjual dan pembeli telah disepakati dan dimufakati sejumlah harga yang pasti misalnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dalam akta itu penjual menyatakan dan menegaskan harga itu telah dibayar penuh oleh pembeli, dan seluruh uang harga itu telah diterima juga oleh penjual ;
- c. Dalam akta pengakuan hutang, disebutkan dan ditegaskan serta diakui oleh yang berhutang, bahwa dirinya (misalnya si Debitur) berhutang uang sebesar Rp. 15 juta rupiah dari dan kepada yang menghutangkan (misalnya si kreditur).

Dari ketiga contoh itu, secara material, secara nyata dibuktikan, tentang kebenaran dan pengakuan dari masing-masing. Oleh karena dengan ditanda-tanganinya akta itu, oleh yang bersangkutan (para yang berkehendak) tidak bisa lain, kecuali terbukti bagi mereka, hal itu sebagai kenyataan yang benar, dan kebenaran yang nyata.

Menurut Djoko Soepadmo, pada akta yang memuat pernyataan pihak-pihak *partij akten* pembuktian materiil itu terletak pada hal ini : bagi para pihak dan mereka yang mendapat-hak daripadanya, pembuktian materiil merupakan bukti yang sempurna sedangkan untuk kepentingan terhadap pihak ketiga, kekuatan pembuktian secara materiil diserahkan kepada hakim.⁶⁹⁾

Pada akta pejabat – atau pada *relaas akta – ambtelijke akten* – tentang materiile bewijskracht atau pembuktian materiil ini tidak akan terjadi. Persoalannya, akta pejabat itu, hanya untuk membuktikan kebenarannya dari apa yang dilihat, didengar dilakukan oleh pejabat. Pada akta protes wissel, misalnya : orang yang didatangi tidak ada pernyataan pihak yang diprotes itu. Kalau notaris mendengar keterangan orang yang diprotes, dan apa yang ditanyakan oleh notaris itu dimuat dalam akta protes ini hanya berarti itu benar apa, yang diterangkan oleh orang yang diprotes, yang menyatakan tidak mau membayar wissel

⁶⁹⁾ Djoko Soepadmo, *Op, Cit.*, hal. 518

dengan alasan, bahwa dia tidak berutang kepada orang itu, memang benar demikian. Akan tetapi pernyataan itu, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang nyata, terhadap orang itu dan juga tidak berlaku sebagai hal yang benar, terhadap yang menghendaki dilakukan protes wissel itu. Nanti pada waktu dilakukan pembuktian secara proseduriil, bahwa nantinya ternyata, misalkan yang diprotes itu setelah diadakan perhitungan, menolak adanya penerimaan barang-barang dagangan ataupun harganya tidak seperti yang ditagih padanya, maka tentang hal itu penarik wissel harus membuktikan, tentang hal itu tentang kebenarannya. Jadi keterangan-keterangan dari orang diprotes dalam akta notaris yang berupa relaas akte itu, tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.⁷⁰⁾

Secara populer, menurut Wawan Setiawan, dapat dikatakan “walaupun akta itu disebut dengan akta notaris, janganlah diartikan bahwa itu aktanya notaris, atau janjinya notaris. Kesemuanya itu adalah pernyataan, perjanjian, kesepakatan, kemufakatan dari mereka yang (meminta untuk itu) dibuatkan dalam bentuk/ujud akta notaris”.⁷¹⁾

(1) Apa yang dimaksud dengan pembuktian yang sempurna antara pihak-pihak dan para penerima hak dari padanya menurut Pasal 1870 B.W :

⁷⁰⁾ Ibid, hal 519

⁷¹⁾ Wawan Setiawan, *Op., Cit.*, hal. 68

- (a) Bahwa surat tertulis itu yang berupa akta otentik, kalau diajukan di sidang pengadilan, maka akta itu sudah mencukupi, sudah sempurna sebagai alat bukti dan karena itu hakim tidak boleh minta alat bukti yang lain untuk melengkapinya. Jadi apabila dalam akta tersebut, sudah tercantum semua fakta-fakta hukum *rechtsfeiten*, atas dasar mana diajukan tuntutan, maka hakim harus meluluskan tuntutan itu.
- (b) Bahwa pembuktian sebaliknya dari kebenaran yang nyata (*feitelijke waarheid*), pada prinsipnya diperkenankan, dengan cara-cara yang diperkenankan oleh undang-undang.

Selain daripada itu, hendaknya hakim melihat pada Pasal 1922 B.W. yang menyatakan, persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain selainnya yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian itu hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal di mana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.⁷²⁾

⁷²⁾ Ibid. hal. 519

Jadi, sekali lagi pada prinsipnya, hakim harus menganggap bahwa akta otentik itu, adalah merupakan bukti yang sempurna, sampai dapat dibuktikan yang sebaliknya.

(2) Yang dimaksud dengan para pihak, ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya.⁷³⁾

Para pihak ialah : semua yang terlibat mempunyai kepentingan dalam terjadinya akta.

Jadi para penghadap dalam akta otentik orang, atau yang disebutkan namanya dalam akta di bawah tangan, sebagai pihak-pihak, kalau mereka itu bertindak untuk diri sendiri. Mereka yang memberi kuasa kepada para penghadap untuk bertindak untuk, dan atas namanya yang memberi kuasa – badan hukum-badan hukum – kalau penghadap bertindak mewakili badan-badan hukum tersebut, misalnya : Direktur Perseroan Terbatas yang mewakili Perseroan tersebut. Orang-orang yang diwakili oleh penghadap, berdasarkan undang-undang, misalnya : anak di bawah umur yang diwakili ayahnya orang yang berada di bawah pengampunan yang diwakili pengampunya dalam akta.

Siapa yang menjadi ahli waris, ditetapkan berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris, berdasarkan hukum waris.

⁷³⁾Ibid. hal. 520-521

(3) *Kekuatan pembuktian materiil akta otentik terhadap pihak ketiga*

Pembuktian materiil ini terhadap pihak ketiga, diserahkan kepada pertimbangan hakim Persoalannya karena tidak diatur dalam undang-undang. Selain dari pada itu, orang harus ingat pada doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya, setiap penandatanganan akta otentik itu dianggap benar, untuk kepentingan dan untuk keuntungan pihak lain, dan bukan untuk kepentingan atau keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang menandatangani akta otentik itu untuk kerugian pihak lain, tanpa persetujuannya tidak mengikat pada pihak lain itu.

D. Pembatalan Akta Notaris.

Pengertian “batal” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau dengan kata lain, arti kata batal secara harfiah adalah tidak berlaku atau tidak jadi dilaksanakan atau juga berarti tidak berhasil.⁷⁴⁾

Menurut J.C.T. Simorangkir et.al, batal diartikan sebagai tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum.⁷⁵⁾

Kebatalan (*nietigheid*), dalam hukum perjanjian dalam B.W. dibedakan antara *nietigheid* (batal) dan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan). Satu perjanjian jual beli, misalnya yang mempunyai tujuan (*causa*) terlarang, batal

⁷⁴⁾ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : PN Balai Pustaka 1973) hal. 95

⁷⁵⁾ J.C.T. Simoarangkir. et.al, *Op., Cit.*, hal. 15

dengan sendirinya (*nietig*) (B.W. Pasal 1335) (artinya tidak ada jual beli), karena sejak bermula perjanjian jual beli itu batal. Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh orang-orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum (orang-orang yang belum cukup umur, orang yang ditempatkan di bawah curatele (B.W. Pasal 1330), dapat dimintakan pembatalannya oleh Hakim (*vernietigbaar*), oleh orang-orang tertentu. Dalam hal belakangan ini, tidak dapat dikatakan, bahwa tidak ada terjadi satu perjanjian. Diantara orang-orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum dengan pihak lainnya itu, timbul satu perhutangan yang sah, yang kalau perhutangan itu tidak dipenuhi, hakim akan menghukumkan penggantian kerugian, kecuali apabila wakil dari orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum itu, mengemukakan ketidakmampuan tersebut, dan menuntut pembatalan dari perhutangan itu kepada hakim.⁷⁶⁾

Didalam ilmu dan praktek hukum perdata, menurut M. Nata Saputra dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara* dikenal pelbagai macam pengertian pembatalan sebagai berikut :⁷⁷⁾

⁷⁶⁾ Martias gelar Imam Radjo Mulano *Pembahasan Hukum, Penjelasan-penjelasan Istilah Hukum Belanda/Indonesia untuk studi dan Praktijk* (Medan : Perusahaan Daerah Sumatra Utara, 1996) hal. 186

⁷⁷⁾ M. Nata Saputra *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : C.V. Rajawali, 1988) hal. 68

a. Batal demi (karena) hukum (*nietigheid / van rechtswege*)

Pembatalan yang tidak boleh tidak, harus terjadi ; dan oleh tiap-tiap orang dapat dianggap batal sewaktu-waktu dengan tidak menunggu ketetapan hakim atau yang berkepentingan. Atau dengan kata lain, akibat suatu perbuatan, untuk sebagian atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya akibat itu. Orang tidak boleh, mendasarkan perbuatan hukum atas suatu perbuatan hukum yang *nietieg* itu. Contoh : Pembuatan hibah wasiat (*testament*) adalah batal apabila syarat-syaratnya yang tercantum dalam Pasal 930-948 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara tidak dipenuhi. Jadi pembatalannya bersifat *ex tunc*.

b. Batal (*nietig*)

Berarti, bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan tidak ada, sehingga akibat perbuatan itu, dianggap tidak pernah ada. Pembatalannya bersifat *ex tunc*. Misalnya : A dan B mengadakan suatu perjanjian pada tanggal 1 Desember 1981.

Pada tanggal 1 April 1982 oleh hakim diadakan pembatalan (*vernietiging*) perjanjian itu, karena mengandung beberapa kekuarangan yang esensial (*essentieel*) umpamanya saja, tidak memuat beberapa *essentialia* yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Bagi hukum perjanjian itu,

dianggap tidak pernah ada. Segala sesuatu (akibat) yang karena perjanjian itu diadakan antara tanggal 1 Desember 1981 sampai tanggal 1 April 1982 harus dihapuskan, atau dengan perkataan lain, status kedua belah pihak (A dan B). Pada tanggal 1 April 1982 harus dikembalikan pada status hukum mereka, sebelum tanggal 1 Desember 1981, seakan-akan perjanjian itu tidak pernah diadakan, jadi seluruh akibat perjanjian itu dihapuskan.

Catatan : Pasal 1320 KUHPerdara: Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3). Suatu hal tertentu (causa dalam hukum) ;
- 4). Suatu sebab yang halal.

c. Dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid*)

Perbuatan hukum yang bersangkutan harus dianggap sah selama belum ada ketentuan hakim bahwa perbuatan itu batal, maka perbuatan-perbuatan hukum yang berdasarkan perbuatan yang baru kemudian dibatalkan adalah sah pula. Dengan kata lain bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada, sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk itu.

Pembatalan ini, biasanya dilakukan karena perbuatan tersebut mengandung suatu kekurangan. Jadi jelasnya bagi hukum, perbuatan tersebut ada, sampai waktu pembatalannya, oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya sampai waktu pembatalannya menjadi sah (kecuali apabila undang-undang menentukan lain). Dan setelah pembatalan, maka perbuatan itu tidak ada, sehingga akibat yang ditimbulkannyapun sebagian atau seluruhnya dihapus.

Dalam contoh di atas, bagi hukum perjanjian antara A dan B sampai tanggal 1 April 1982, dengan segala akibatnya menjadi sah. Bersifat *ex nunc*.

d. Batal mutlak (*absoluut nietigheid*)

Pembatalan yang berlaku terhadap dan/atau dapat dituntut oleh tiap-tiap orang. Contoh: pembatalan testament.

e. Batal nisbi (*relatief nietigheid*)

Pembatalan yang hanya mempunyai akibat terhadap dan/atau hanya dapat dituntut oleh berapa orang tertentu saja. Contoh : Pasal 98 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa pembatalan perkawinan tidak dapat merugikan kepentingan orang lain, atau pihak ketiga (*derden*), yang secara jujur melakukan perbuatan hukum bersama-sama dengan suami atau isteri dalam perkawinan (dulu). Sekarang Pasal 28 ayat 2 sub c Undang-undang

Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974, LNRI No. – tahun 1973, berlaku 2 Januari 1974), yang mengatakan bahwa orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk a dan b (maksudnya : tidak termasuk anak-anak, istri atau suami) keputusan ini tidak berlaku, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik, sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

f. Dapat dibatalkan nisbi (*relatieve vernietigbaar*)

Sesuatu perbuatan bagi hukum dapat dikatakan nisbi, bilamana pembatalan perbuatan yang bagi hukum sah sampai waktu pembatalan dapat dituntut oleh beberapa orang tertentu.

g. Batal untuk sebagian (*gedeeltelijk nietig*)

Apabila akibat sesuatu perbuatan hukum, dianggap batal untuk sebagian saja, sedangkan bagian lain dari akibat dianggap sah.

Akta Notaris yang batal, adalah akta notaris yang pembatalannya atau batalnya harus dengan putusan hakim, ini berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan itu dianggap tidak pernah ada, dan akibat perbuatannya juga dianggap tidak pernah ada, status hukum atau kedudukan hukum dari orang-orang atau badan hukum yang disebut dalam akta notaris tersebut, dikembalikan kepada kedudukan hukum semula, sebelum akta notaris tersebut diterbitkan.⁷⁸⁾

⁷⁸⁾ Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Administrasi Negara dan peradilan Administrasi Negara* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990) hal. 189

Menurut pendapat sebagian besar sarjana, batal demi hukum atau *Van Rechtwege Nietig* tidak memerlukan putusan hakim, karena apa yang batal demi hukum itu, dari semua dianggap tidak pernah ada, dengan kata lain *Van Rechtwege Nietig* berlaku mundur sejak dibuatnya suatu akta, misalnya kesalahan yang terjadi pada isi akta, di mana para pihak memberikan atas obyek perjanjian yang pada pembuatan akta dianggap benar, tetapi ternyata dikemudian hari, obyek tersebut tidak ada atau palsu. Sedangkan dapat dibatalkan atau *van Neitighbaar*, berlaku sejak putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sebagai contohnya misalnya : yang bersangkutan mengaku ia adalah sebagai Warga Negara Indonesia, dengan menunjukkan fotocopy surat bukti ia adalah Warga Negara Asing.⁷⁹⁾

Akta pembatalan dengan pembatalan akta notaris adalah berbeda. “Akta pembatalan” artinya suatu akta yang dibuat dihadapan notaris dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan (para penghadap). Akta tersebut dibuat, adalah untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, yang juga termuat dalam suatu akta. Dalam pembuatan akta pembatalan ini dapat dilakukan dengan notaris berbeda dengan akta sebelumnya.⁸⁰⁾

⁷⁹⁾ Liliana budi Santoso *tujuan Yuridis terhadap kekuatan Mengingatnya Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris*, Skripsi Fakultas universitas Tarumanegara (Jakarta : 1995) hal 77

⁸⁰⁾ Ibid. hal 77

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. Jadi metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode, yang dipergunakan dalam penelitian.⁸¹⁾ Metode di sini, diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.⁸²⁾

Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah, yang dilakukan secara terencana dan sistematis, guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁸³⁾

Setiap penelitian, mempunyai metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan, berdasarkan tujuan penelitian ini, maka kita akan dapat memilih metode penelitian yang tepat, serta teknik pengambilan contoh dan teknik penarikan kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang ditetapkan.

⁸¹⁾ Jujun. S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta Pustaka Sinar harapan 1995) hal. 328

⁸²⁾ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposan* (Jakarta PT. Melton Putra, 1990) hal. 24

⁸³⁾ Sumadi Surya Brata, *Metedologi Penelitian*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1994) hal. 60

Karena, sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penefitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdapat banyak putusan yang membatalkan akta notaris.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan, dimaksudkan untuk mengetahui disain atau rancangan penelitian, yang berkenaan dengan populasi, sampel dan instrumen yang digunakan, untuk mengumpulkan data penelitian.⁸⁴

Dalam mengadakan penelitian tesis yang berjudul, *"Kekuatan Akta Notaris Sebagai alat bukti dalam praktek Pengadilan,"* digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian ini, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian, dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap para praktisi hukum, untuk memperoleh pengetahuan empiris

⁸⁴ Mardalis, *Op.. Cit.*, hal. 53

Yuridis dalam penelitian ini, dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan tertulis. Sedangkan secara empiris, karena penelitian ini bertujuan, untuk memperoleh pengetahuan empiris, mereka yang mengalami kekuatan akta notaris dalam praktek peradilan.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan thesis ini, digunakan tipe penelitian yang bersifat inferensial, artinya penelitian tidak hanya memberikan suatu gambaran dan analisa tentang obyek yang menjadi masalah tersebut, tetapi juga menarik kesimpulan-kesimpulan tentang masalah yang dibahas tersebut.⁸⁵⁾ Yaitu masalah Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Pengadilan.

D. Metode Penentuan Sampel

1. Populasi

Menurut kamus riset karangan Drs. Komaruddin, yang dimaksudkan dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada kenyataannya, populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu, yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut, dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa. Sekiranya populasi itu, terlalu banyak jumlahnya, maka biasanya diadakan sampling. Untuk menentukan apakah sampel itu dapat mewakili populasi, diperlukan perhitungan statistik, agar dapat memberi petunjuk mengenai

⁸⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro. *Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990) hal 16

penyimpangan sampel dan populasi dan sekaligus dapat memberi kepastian, mengenai tingkat kepercayaan, yang selanjutnya dipergunakan untuk menilai data yang diperdapat dari sampel.⁸⁶⁾

Sampling atau sampel itu sendiri berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel ialah memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian, dengan cara mengamati sebagian dan populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lainnya dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dan hasil penyelidikan.⁸⁷⁾

Hakekat penggunaan sampel dalam penelitian adalah dikarenakan sulitnya untuk meneliti seluruh populasi, hal ini mengingat biaya dan waktu yang begitu banyak diperlukan jika harus meneliti seluruh populasi. Dengan alasan tersebut, maka penelitian biasanya hanya dilakukan terhadap sampel yang telah dipilih saja, yang penting sampel tersebut dapat mewakili populasi, yang akan dijadikan generalisasinya nanti, setelah penelitian selesai. Lain halnya dengan "sensus", yang mengharuskan setiap populasi harus diteliti dari segala aspeknya.

Hal ini memang, dimaksudkan untuk data statistik pengembangan suatu rencana pembangunan. Karena pembangunan memerlukan data yang lengkap dan terperinci, untuk ini pemerintah menyediakan tenaga dan biaya serta waktu yang

⁸⁶⁾ Komarudin, *Kamus Riset* (Bandung: Angkasa, 1984) hal 203

⁸⁷⁾ Mardalis, *Op., Cit.*, hal 5.

banyak sekali, namun pelaksanaannya juga, satu kali 5 tahun atau satu kali 10 tahun. Lain halnya dengan penelitian mahasiswa, yang direncanakan sendiri, dibiayai sendiri dan dilaksanakan sendiri. Untuk itu penelitian mahasiswa cukup dengan sampel.⁸⁸⁾

Populasi dalam penelitian ini adalah unit dan orang yang berkaitan dengan tesis ini, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat, notaris di Jakarta Barat dan advocat di Jakarta Barat.

2. Teknik Sampling

Dalam penentuan sampel responden, akan dipergunakan metode non random sampling, dasar utamanya logika dan common sense, artinya tidak semua unsur dalam populasi, mempunyai kesempatan yang sama, untuk menjadi wakil dan populasi.⁸⁹⁾

Metode sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah metode quota sampling, yang merupakan proses penarikan sampel, untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan, dengan cara memilih yang paling mudah dicapai oleh peneliti, dari unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti.⁹⁰⁾ Dimana metode ini, berlandaskan

⁸⁸⁾ Ibid. hal. 56

⁸⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op., Cit.*, hal. 51

⁹⁰⁾ Ibid, hal 50

pada informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh dari populasi.⁹¹⁾

Tujuan utama dari penerapan quota sampling adalah untuk mendapatkan suatu replika dari populasi, yang kemudian digeneralisasikan oleh penulis.⁹²⁾

Beberapa keuntungan dari penerapan quota sampling adalah antara lain bahwa biaya relatif lebih murah dan sampai batas-batas tertentu, menjamin ditelitinya sampel yang dikehendaki oleh peneliti. Akan tetapi ada kemungkinan, bahwa responden yang dipilih, adalah yang paling menguntungkan (misalnya, teman atau keluarga dari interviewer), kecuali itu, maka bias dalam klasifikasi, tidak mustahil terjadi pula.⁹³⁾

Quota sampling, dengan menggunakan berbagai macam daftar, misalnya daftar nama hakim, daftar nama Notaris dan daftar nama Pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.⁹⁴⁾

Untuk menilai kegunaan penerapan quota sampling, perlu dipertimbangkan tujuan penelitian, biaya waktu maupun tenaga peneliti yang ada.⁹⁵⁾

⁹¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1984) hal. 51

⁹²⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op., Cit.*, hal.50

⁹³⁾ Ibid. hal 50

⁹⁴⁾ Ibid. hal.50

⁹⁵⁾ Ibid. hal.50

Selanjutnya sampel akan diambil dari populasi secara quota sampling. Adapun sampel-sampel tersebut adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Jumlah hakim yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah 28 Hakim. Meskipun populasi hakim berjumlah 28 orang, keterwakilan hakim dalam memberikan pengetahuan dan informasi dalam tesis ini dalam menilai kekuatan akta notaris sebagai alat bukti cukup terwakili 5 sampel.

2. Notaris

Jumlah notaris yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 173 orang, karena jumlah populasi notaris yang 6 kali jumlah populasi hakim, penulis agak kesulitan untuk mengambil populasi secara proporsional, namun karena pengetahuan dan informasi yang terkait dengan tesis ini hanya mengenai tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya cukup terwakili 3 sampel.

3. Advokad / Pengacara

Jumlah advokad / Pengacara yang terdaftar pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berkedudukan di kotamadya Jakarta Barat, yang terdaftar tahun 1998 sampai 2002 yaitu 184 orang. Keterwakilan advokad dan pengacara cukup terwakili 3 sampel karena pengetahuan dan informasi yang diperlukan hanya mengenai pengalaman penggunaan akta notaris sebagai alat bukti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, diusahakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang obyektif, mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

a. Data

Data yang dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan, disebut data sekunder. Data sekunder ini, berguna sebagai landasan teori, untuk menganalisa pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum Perdata materiil, Hukum Acara Perdata dan Peraturan Jabatan Notaris.
- b) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang masalah kekuatan pembuktian akta notaris.

- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1904 K/Sip/1982 tanggal 30 Juli 1985, Yurisprudensi nomor : 487 K/Sip/1991 tanggal 30 April 1996, dan putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Januari 2000 sampai dengan Desember 2002.

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah kekuatan pembuktian akta notaris.
- b) Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tertier yang terdiri dari :

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan

b. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data, yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa kajian dokumenter. Dalam studi kepustakaan, kajian

dokumenter dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

2. Survey Lapangan

a. Data

Data yang dihimpun dalam penelitian lapangan adalah data primer, yang berupa hasil wawancara dengan para responden, yang menjadi subyek penelitian ini. Adapun penentuan wilayah dan penelitian subyek lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kantor Notaris, serta Kantor Advokad / Pengacara di wilayah Kotamadya Jakarta Barat.

2) Subyek Penelitian

Populasi penelitian lapangan adalah meliputi pihak-pihak, yang berkaitan dengan permasalahan kekuatan pembuktian akta Notaris, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Notaris, dan Advokad/Pengacara. Mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga dan penulis, maka tidak seluruh populasi diteliti Tetapi

hanya dilakukan terhadap mereka, yang terpilih sebagai responden yaitu telah ditentukan, berdasarkan jumlah populasi yang ada.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada survey lapangan ini, berupa pedoman wawancara, karena penelitian lapangan ini, dilakukan dengan cara wawancara atau interview secara langsung dengan para responden. Wawancara yang dimaksud di sini, adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara yang dilakukan dengan berpedoman, pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sebagai bimbingan pokok hal-hal yang akan dipertanyakan. Tetapi masih dimungkinkan, adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan keadaan ketika melakukan wawancara.⁹⁶⁾

F. Metode Penyajian Data

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka setelah data-data yang diperlukan, baik berupa data primer maupun sekunder terkumpul, data-data tersebut digabungkan, untuk kemudian dilakukan proses pengolahan data.

⁹⁶⁾ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Andi, 1988) hal. 202

Hasil penelitian tersebut, secara keseluruhan akan disusun dan disajikan dalam suatu laporan tertulis ilmiah, yaitu dalam bentuk thesis, diikuti dengan pengambilan kesimpulan tertentu, atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

F. Metode Analisa Yang Digunakan

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan secara keseluruhan akan dibahas atau dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan thesis ini, adalah metode analisis kualitatif, artinya adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹⁷⁾

Selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis, serta pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan, dari keseluruhan hasil pembahasan. Dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk thesis.

⁹⁷⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op., Cit.*, hal. 72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akta notaris merupakan akta otentik yang jika dijadikan alat bukti, termasuk alat bukti tertulis yang paling kuat dan mengikat, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Hal tersebut dikarenakan akta notaris tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah dan formil bahwa benar akta tersebut dibuat oleh atau diharapkan pejabat umum (notaris) dan para pihak telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta akan tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil bahwa apa yang diterangkan dalam akta itu (materinya) benar.

Hakim dalam menghadapi akta notaris sebagai alat bukti, tidak dapat begitu saja mengesampingkan kekuatan pembuktian dari akta notaris tersebut. Hakim harus benar-benar meneliti kebenaran dan tujuan yang sebenarnya dari adanya akta notaris itu. Tidak mustahil pula suatu akta notaris dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan jika terbukti melanggar Pasal 20 ayat 3 P.J.N, sehingga hilanglah sifat otentiknya.

Sebagai alat bukti dalam persidangan akta notaris pun rentan menghadapi resiko pembatalan akta oleh Hakim, atas dasar penyalahgunaan dari ketidak fahaman atas ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan

oleh Hukum (contoh kasus Luhur Sindoro, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Sip/1982).

Oleh karena itu, untuk mengetahui kekuatan akta notaris sebagai alat bukti dalam praktek pengadilan lebih lanjut dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek, maka perlu diadakan penelitian empiris. Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi langsung dari sumber data, yaitu populasi penelitian sebagai anggota masyarakat yang terjun langsung di bidang hukum perdata, serta data register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kurun waktu Januari tahun 2000 sampai dengan Desember tahun 2003.

Hasil-hasil penelitian empiris untuk mendapatkan data-data primer dan sebagai pelengkap dipakai data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dituangkan dalam bab IV tesis ini disusun secara Sistimatis dan dikelompokkan agar mudah dipahami dan dianalisa.

A. Tugas Jabatan Notaris Selaku Pelaksanaan Hukum

Para Notaris seperti halnya para Hakim, Panitera Pengadilan, Jurusita, Pengacara, Jaksa dan Polisi adalah perkara-perkara yang menjalankan / melaksanakan hukum.

Kedudukan notaris selaku pelaksana hukum tidak dapat diragukan lagi, sehingga dalam Soetomo Ramelan⁹⁹⁾ *Hoofdstukken Van Vurgerlijke Rechtsordering*, Star Busman menyatakan :

“... .. Lembaga notaris menurut sejarahnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan peradilan, lembaga ini mempunyai arti yang besar dalam menyelenggarakan peradilan karena bertujuan memberikan upaya-upaya pembuktian yang menyakinkan dan terpelihara atas semua tindakan-tindakan dan perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan atau karena ditetapkan oleh Undang-undang.

Dalam hubungan kedudukan para notaris selaku pelaksanaan hukum, kiranya perlu dikemukakan mengenai fungsi jabatan notaris yang telah dikemukakan oleh Prof Mr. J. M. Polak dalam sidang penutupan Perhimpunan Kandidat Notaris pada tanggal 16 November 1973. Di dalam uraiannya tersebut dikemukakan bahwa tugas jabatan notaris dapat dibedakan dalam 3 kategori / model, berturut-turut adalah :

1. Ambtelijke model ;
2. Rechtelijke model ;
3. Rechtshulf model .

⁹⁹⁾ Soetomo Ramelan, “Peran Notaris Dalam Pembangunan Hukum”, Majalah Hukum dan Pembangunan, Agustus 1896, hal. 353 – 354.

Ad. 1. Ambtelijke model.

Tugas notaris selaku pejabat umum, yang diangkat oleh badan kekuasaan umum yang disertai tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan / tindakan, perjanjian dan penetapan-penetapan yang dipindahkan oleh peraturan umum atau atas permintaan pihak-pihak diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum.

Ad. 2. Rechterlijke model

Fungsi ini menuntut kepada para notaris untuk di dalam melaksanakan tugas jabatannya, memberikan pelayanan / jasanya kepada pihak-pihak, sejauh mungkin menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari. Tujuan demikian hanya mungkin dicapai jika dijaga keseimbangan hak, dan adanya kehendak yang ikhlas dan jujur dari pihak-pihak.

Sebelum suatu akta dilangsungkan, notaris wajib mengumpulkan data dan keterangan – keterangan yang selengkapnya, serta mempelajari akibat – akibat hukumnya. Berdasarkan data dan keterangan mana, notaris seringkali dapat memberikan saran – saran, untuk mencegah timbulnya sengketa antara pihak – pihak.

Usaha notaris untuk sedapat mungkin mencegah terjadinya sengketa, sehingga dapat membantu mengurangi tugas pengadilan dengan berkurangnya

perkara-perkara yang harus diselesaikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan citra kewibawaan pengadilan, karena dapat memberikan putusan-putusan yang cepat dan adil untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan.

Ad. 3. Rechtshulf model

Para notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan penerangan-penerangan yang lengkap dan jelas mengenai akibat-akibat hukum dari tiap-tiap perjanjian yang dibuatnya.

Dalam hubungan ini notaris terpenggil untuk melindungi pihak-pihak yang lemah baik karena kedudukan ekonomi maupun pengetahuan mengenai hukum.

Notaris menurut Undang-undang tidak boleh berpihak, dalam memberikan pelayanannya notaris dilarang untuk hanya memperhatikan dan melindungi kepentingan pihak yang membayar honorarium notaris.

Tugas jabatannya, menuntut untuk memperlakukan pihak-pihak sama tinggi tanpa membedakan kedudukannya dalam masyarakat.

Masih dalam hubungan dengan fungsi-fungsi notaris yang diuraikan diatas, notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh

peraturan-peraturan jabatannya, antara lain yang perlu diindahkan dan dilaksanakan adalah :

1. Kewajiban untuk memberikan penerangan (*informatieplicht*) ;
2. Kewajiban untuk merahasiakan ; dan
3. Kewajiban untuk memberikan pelayanan yang di minta oleh mereka yang membutuhkan.

Mengenai kewajiban untuk memberikan penerangan dapat kiranya ditunjuk pada uraian mengenai *rechtshulp* model. Kewajiban untuk merahasiakan diatur dalam Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris, di dalam pasal tersebut dibebankan kepada seorang notaris sebelum memulai tugas jabatannya mengucapkan sumpah atau janji untuk merahasiakan mengenai isi akta-akta yang dibuatnya. Kewajiban ini menurut doktrin tidak terbatas pada isi aktanya saja, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang didengar dan dilakukan oleh para pihak-pihak sebelum dan pada waktu dilangsungkannya aktanya.

Pelanggaran atas kewajiban untuk merahasiakan diancam dengan hukuman denda, dan jika terjadi pelanggaran ulang diancam dengan hukuman pemberhentian sementara (*schorsing*). Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam *Algemene Wet Rijksbelastingen* Belanda kepada pekerja-pekerja dalam bidang keagamaan, notaris, advokaat, dokter, dan apoteker diberikan

kewenangan untuk menolak membuka dan memperlihatkan buku atau memberikan keterangan kepada inspektur pajak.

Untuk dapat mempertahankan kedudukannya selaku orang kepercayaan dari para pihak yang memerlukan jasa pelayanannya, kepada notaris di berikan hak ingkar (*verschoningsrecht*) yang memperoleh pengaturannya dalam Pasal-pasal 40 dan 17 P.J.N. Bahwa hak ingkar ini oleh hakim yang memeriksa juga dihormati dapat dilihat dari putusan *Hof Arnhem* dari tanggal 23 Juni 1931. *Nederland Juristenblad* 1934 halaman 1498.¹⁰⁰⁾ dalam pemeriksaan perkara mana hakim membebaskan notaris sebagai saksi untuk didengar keterangannya mengenai hal-hal yang diberitahukan kepadanya oleh para pihak dalam hubungan penjualan dan pembelian suatu benda tetap.

Pasal 7 PJN melarang notaris menolak memberikan bantuan kepada mereka yang meminta pelayanannya, kecuali adanya alasan-alasan yang diberikan oleh hukum. Dengan adanya larangan untuk menolak memberikan bantuan (*verbod van dienstweigering*) notaris mempunyai posisi yang berbeda dengan seorang advokat atau pengacara, yang terakhir ini tidak dibebankan kewajiban demikian sehingga dengan alasan apa pun ia bebas untuk menolak memberikan bantuan.

¹⁰⁰⁾ Ibid., hal. 354

Seorang notaris dapat menolak bantuan yang diminta, yakni jika bantuan yang diminta bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau undang-undang. Apakah suatu tindakan hukum atau perjanjian bertentangan dengan hal-hal yang disebut di atas, kiranya masih terbuka untuk dipermasalahkan, sehingga pihak yang ditolak permintaanya untuk memperoleh bantuan dapat meminta putusan pengadilan.

Dalam hal hakim setelah mempertimbangkan alasan-alasan tersebut tidak memadai, hakim dapat memerintahkan notaris yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, dengan atau tanpa kewajiban membayar ganti rugi.

Adanya kewajiban memberikan bantuan dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa kewenangan-kewenangan jabatannya yang diberikan kepada notaris, ditujukan bagi kepentingan umum atau publik, bukan untuk kepentingan pribadinya, sebagai demikian merupakan kewajiban jabatan.

Fungsi-fungsi tersebut menurut Notaris Arikanti Natakusumah, dalam praktek ditambahkan dengan fungsi sebagai *Entrepreneur / ordenemer / pengusaha (ordecemers model)*, notaris mempertahankan kliennya untuk membiayai usahanya. Sehingga dapat dibayangkan betapa sulitnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya, karena sekaligus mempunyai 4 fungsi yang tidak jarang satu sama lain sering bertentangan dalam diri notaris itu sendiri.¹⁰¹⁾

¹⁰¹⁾ Notaris Arikanti Natakusumah, Wawancara pribadi 21 Maret 2003

Jadi dapat disimpulkan tidaklah tepat bila notaris hanya berfungsi sebagai “pencatat” seperti yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo :¹⁰²

Mengingat bahwa pada dasarnya notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan menyidik kebenaran materiil isinya” (lihat putusan MA 8 September 1973 Nomor 702K/Si/1973)”

Akan tetapi notaris mempunyai keempat fungsi tersebut di atas, sehingga notaris bertanggungjawab terhadap Akta otentik yang dibuatnya bila diajukan sebagai Alat bukti.

Dalam hal ini dikuatkan pula oleh yurisprudensi MARI Nomor : 1904K/Sip/1982 tanggal 30 Juli 1985 yang salah satu kaidah hukumnya:¹⁰³

“Menyatakan adanya ajaran “misbruik van omstandigheden” atau undue influence” atau adanya “penyalahgunaan keadaan” yang membuat debitur menandatangani akta notaris yang bersifat memberatkan baginya sehingga dapat diklasifikasikan kehendak satu pihak, sehingga Hakim berwenang membatalkan akta notaris tersebut”

B. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Pengadilan

1. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Pengadilan.

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa dihadapan hakim di persidangan, ada beberapa alat bukti yang dapat diajukan.

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal 126

¹⁰³ Setiawan, *Op. Cit.* hal. 410

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat – alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat – alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang – Undang saja. Alat – alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh Undang – Undang (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 Bw) ialah :

Alat bukti tulisan, pembuktian dengan saksi, persangkaan – persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁰⁴⁾

Alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat – surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁰⁵⁾

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR; Pasal 1868 KUH perdata dan 285 Rbg, yang bunyinya sebagai berikut :

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang

¹⁰⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal. 120

¹⁰⁵⁾ Pitlo. *Op. Cit.* hal 52

terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta."

Pejabat yang dimaksudkan antara lain adalah notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatatan sipil, hakim dan sebagainya.

Jadi akta notaris adalah akta otentik bila dikaitkan antara Pasal 1868 KUH perdata Jo. Pasal 1 PJN.

Para ahli maupun UU tidak memberikan definisi tentang akta notaris namun bila Pasal 1868 KUH perdata dihubungkan dengan Pasal 1 PJN, dapat ditarik suatu definisi akta notaris sebagai berikut :

" Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang perbuatan akta itu, oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Berdasarkan definisi tersebut diatas dan menurut GHS. Lumban Tobing, bahwa ada dua golongan akta notaris, yakni :

- a. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) notaris atau yang dinamakan "*akta Relas*" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*) : termasuk dalam "akta relaas" antara lain Berita Acara para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, akta pencatatan Budel dan lain – lain akta, yakni akta – akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 PJN. Dalam semua akta ini

notaris menerangkan / memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum. Kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain;

- b. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris yang dinamakan “Akta Partij” (*Partij Akten*) : termasuk akta – akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemauan terakhir (wasiat), kuasa dan sebagainya. Didalam “Akta Partij” ini dicantumkan secara otentik keterangan dari orang – orang yang bertindak sebagai pihak – pihak dalam akta itu, disamping relaas dari notaris itu sendir, yang menyatakan bahwa orang – orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu.¹⁰⁶⁾

Untuk mengetahui yang dimaksud dengan akta notaris sebagai alat bukti dalam praktek, menurut Gempar Setiyono (Panitera Muda Perdata Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat), mengatakan bahwa di dalam praktek akta notaris sering dijumpai. Dan kebanyakan akta notaris tersebut berupa akta partij berupa akta jual beli saham, sewa menyewa dan sebagainya.¹⁰⁷⁾

¹⁰⁶⁾ GHS. Lumban Tobing, *Op. Cit.* hal 51

¹⁰⁷⁾ Gempar Setiyo, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Wawancara Pribadi : 20 Maret 2003

Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kurun waktu Januari 2000 sampai dengan Desember 2003, penggunaan akta otentik sebagai alat bukti dalam sidang di Pengadilan mencapai 60 % (dengan perincian 10 % akta notaris, selebihnya akta pejabat lain), sisanya 40 % adalah surat di bawah tangan).¹⁰⁸⁾

Penggunaan akta notaris dalam praktek di Pengadilan Jakarta barat dengan prosentase 10 % sebagai alat bukti, menunjukkan timbulnya kesadaran, akan arti pentingnya akta notaris sebagai akta otentik. Hal tersebut dikarenakan, menurut pasal 165 HIR (pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1870 jo pasal 1871) akta notaris sebagai akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok akta, kalau yang dituturkan dalam akta terebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta menurut pasal 1871 KUHperdata. Hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti.

Namun demikian, menurut Setiawan, hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta-akta otentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian, sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (*genoegzaam*) untuk mengabulkan akibat

¹⁰⁸⁾ Pengadilan Negeri Jakarta Barat : 20 Maret 2003

hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya.¹⁰⁹⁾

Sebagaimana pendapat G.H.S. Lumban Tobing kekuatan pembuktian akta otentik dengan demikian juga akta notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta otentik yang dibebankan oleh Undang-undang, kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah, terletak pemberian tanda kepercayaan, kepada para akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian, untuk apa menugaskan kepada mereka, untuk memberikan keterangan dari semua apa yang mereka saksikan, didalam menjalankan jabatan mereka atau untuk merelatif secara otentik, semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka itu, dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu.¹¹⁰⁾

Kekuatan pembuktian akta notaris seperti akta otentik lainnya, menurut Endang Ipsiani akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Bagi hakim merupakan bukti wajib (*Verlipcht bewijs*).¹¹¹⁾

Terhadap hal tersebut, menurut G.H.S. Lumban Tobing isi keterangan dari akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian yang

¹⁰⁹⁾ Setiawan, *Op, Cit.* hal 405

¹¹⁰⁾ G.H.S. Lumban Tobing, *Op, Cit.*, hal. 54-

sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian : ¹¹²⁾

- a. Bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka Pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda bukti lainnya di samping itu ;
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya, senantiasa diperkenankan dengan alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang-undang.

Di atas dikatakan, bahwa suatu akta otentik apabila digunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya yang dinamakan *vrije bewijstheorie*, yang berarti bahwa kesaksian para saksi, misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi hanya dengan akta otentik di mana undang-undang mengikat Hakim pada alat bukti itu. Sebab jika demikian, apa gunanya Undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti, jika hakim begitu saja dapat mengesampingkan. ¹¹³⁾

Kemudian mengenai kekuatan pembuktian akta otentik bersifat "*acte ambtelijk*" merupakan suatu bukti sempurna dan mengikat (Pasal 165 HIR, Pasal

¹¹¹⁾ Endang Ipsiani, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Wawancara Pribadi : 17 Maret 2003

¹¹²⁾ G.H.S. Lumban Tobing, *Op., Cit.*, hal. 60-61

¹¹³⁾ *Ibid* hal. 60-61

285 Rbg, Pasal 1870 Perdata) Pengertian “sempurna” dimaksudkan, bahwa akta otentik tersebut, cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak. Konkretnya, sebagai bukti sempurna, dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Sedangkan “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut, harus dipercaya Hakim, yakni harus di anggap sebagai benar, selama ketidak benaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya. Sedangkan akta otentik bersifat “*acte partij*”, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg atau Pasal 1870 KUHperdata, maka kesempurnaan hanya berlaku terhadap kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang atau pihak ketiga, maka akta tersebut tidaklah bersifat alat bukti sempurna, melainkan sebagai alat pembuktian bebas (*bewijsmiddel met vrije bewijskracht*) di mana, penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan, rasa keadilan dan kebijaksanaan Hakim.¹¹⁴⁾

Kemudian oleh Judikno Merkusumo dikemukakan tiga kekuatan pembuktian akta notaris :¹¹⁵⁾

1. Kekuatan pembuktian lahir akta notaris sebagai asas berlaku *acta public probant seseipsa*, yang berarti bahwa suatu akta, yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai

¹¹⁴⁾ Ibid, hal. 61

¹¹⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal 130 – 132

terbukti sebaliknya. Hal ini berarti, bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada, siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya (*authencity*). Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam pasal 138 HIR (pasal 164 Rbg. 148 Rv). Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti otentik, maka akta notaris, baik akta pejabat (*akta ambtelijk*), maupun akta para pihak (*akta partij*), ini keistimewaannya yang terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

2. Kekuatan pembuktian formil akta notaris.

Dalam arti formil akta otentik, membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran, daripada keterangan pejabat, sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini, yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat, serta keaslian tanda tangan. Pada akta pejabat (*akta ambtelijke*) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak : pejabatlah yang menerangkan. Maka bahwa pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam hal akta para pihak (*akta partij*) bagi siapapun telah pasti bahwa pihak – pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum diatas tanda tangan mereka.

3. Kekuatan pembuktian materiil akta notaris

Akta pejabat (*akta ambtelijke*) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti, bahwa telah pasti, bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Disini pernyataan dari para pihak tidak ada. Kebenaran dari pernyataan pejabat, serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya, akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil, ialah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil. (Ps. 25 S 1849 No. 25, 27 , S 1917 No. 130 Jo S 1919 No. 81, 22, S 1920 No.751 Jo. S 1972 No. 564). Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya. Sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya, harus dianggap benar, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Lain halnya, dengan akta yang dibuat oleh para pihak (*akta partij*) : bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya, merupakan bukti sempurna. Semua akta *partij* mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian materiil ini, diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dengan demikian, barang siapa yang menyatakan, bahwa akta itu palsu, maka orang tersebut, yang harus membuktikan kepalsuan akta itu.¹¹⁶⁾

Mengenai alat bukti tulisan itu sendiri, oleh Hapsoro Hadiwidjojo¹¹⁷⁾ dalam bukunya membaca dan mengerti HIR, dikatakan bahwa membantah kemurnian atau keaslian (*ehtheid*) dari surat bukti itu, dapat berupa :

1. Menuduh palsu. Hal ini mengandung, maksud bahwa sejak semula surat bukti tersebut, memang palsu (tidak benar);
2. Menuduh dipalsukan. Mengandung maksud, bahwa surat bukti tersebut semula adalah asli / murni, namun kemudian dipalsukan.

Masih menurut Hapsoro Hadiwidjojo, tuduhan pemalsuan dapat meliputi hal – hal :¹¹⁸⁾

1. *Materieel Valscheid* (palsu materiil), misalnya yang palsu adalah tanggal atau tanda tangannya;
2. *Intelectual Valscheid*, isi dari surat palsu.

Menurut Setiawan, kepalsuan suatu akta otentik, seperti halnya akta pada umumnya, dibedakan antara kepalsuan materiil (*materiele valsheid*). Dikatakan ada kepalsuan materiil, apabila terdapat cacat, pada kekuatan pembuktian dari segi wujudnya (*ultwendige lelwijskrahct*). Kepalsuan

¹¹⁶⁾ Henry Darmawan Hutabarat / wawancara pribadi : 23 Maret 2003

¹¹⁷⁾ BPH. Hapsoro Hadiwidjojo. *Op. Cit.* hal 47

¹¹⁸⁾ Ibid hal 47

intelektuil (*Interlecturle Valsheid*), mengandung arti, bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta, tidak berdasar kebenaran. Dengan mengemukakan adanya kepalsuan intelektuil, maka seseorang menyerang kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) suatu akta.¹¹⁹⁾

Oleh Setiawan, dicontohkan mengenai kepalsuan materiil dalam kasus Luhur Sindoro putusan Mahkamah Agung nomor 1904 K / Sip / 1982, bahwa terlawan III, tidak pernah menghadap notaris untuk membuat dan menandatangani tertanggal 6 September 1977 nomor 9.¹²⁰⁾

Sedangkan menurut Wawan Setiawan,¹²¹⁾ siapa yang menyatakan bahwa akta itu, memuat keterangan, yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti menuduh, bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu, misalnya ada bagian kalimat yang hilang atau diganti dengan perkataan lain, atau ada penambahan kata – kata.

Hal demikian itu berarti menuduh keterangan Si pejabat palsu (*materiele valsheid*). Untuk itu harus ditempuh “*valcheide procedure*” (pasal 148 sub 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata).

- Siapa yang menuduh, bahwa akta memuat “keterangan” dari pihak yang sesungguhnya tidak ada diberikan. Hal itu ada dua kemungkinan :

¹¹⁹⁾ Setiawan, *Op. Cit.* hal. 409

¹²⁰⁾ Ibid. hal. 409

¹²¹⁾ Wawan Setiawan. *Op.Cit. hal.* 66

Pertama, ia dapat langsung tidak mengakui dan membuktikan bahwa tandatangan yang terdapat di bagian bawah dari akta itu bukan tanda tangannya, artinya ia tidak pernah menandatangani akta itu, adalah tandatangan orang lain. Karenanya terjadi pemalsuan dan boleh dibuktikan melalui "*valseheid procedure*" (pasal 148 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata).

Kedua, ia dapat mengatakan bahwa pejabat (notaris), melakukan kekhilafan / kesalahan, dengan menyatakan dalam akta itu, bahwa tandatangan itu, adalah tandatangan yang berasal daripadanya. Dalam hal ini, tidak menuduh tandatangan itu palsu, akan tetapi menuduh, bahwa keterangan dari notaris itu tidak benar (*intelectual valseheid*) suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kaitan dengan "*valseheid procedure*". Dalam hal demikian tidak ada pemalsuan, melainkan suatu kekhilafan, yang mungkin tidak disengaja, sehingga tuduhan itu, bukan terhadap kekuatan pembuktian formal, akan tetapi terhadap kekuatan pembuktian material, dari keterangan notaris itu. Untuk pembuktiannya yang dapat dipergunakan segala alat pembuktian yang dipergunakan menurut hukum.

Hal ini berbeda dengan akta di bawah tangan, bagi hakim merupakan bukti bebas (*virij bewij*), bisa diterima atau tidak.

Dalam arti, "Pengakuan isi dan tandatangan di muka pengadilan adalah prinsip / urgent untuk surat di bawah tangan, sedangkan bagi ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tandatangan tersebut. Karena

akta di bawah tangan tidak mempunyai pembuktian keluar (Pasal 1 b ordinasi 1867 No.29).

Berkenaan dengan hal tersebut, mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, Henry Dermawan Hutabarat, mengatakan bahwa jika dalam akta otentik tanda tangan tidak merupakan suatu persoalan, maka pada akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar atau tidaknya akta yang bersangkutan telah di tandatangi oleh yang bersangkutan, merupakan acara pertama.¹²²⁾

Ditambahkan oleh Agela Sebayang,¹²³⁾ bahwa pada akta otentik orang yang menanda tangani serta tanggal pembuatannya telah cukup terbukti, sedangkan pada akta di bawah tangan, tanda tangan dan isinya dapat dipungkiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan hal demikian ini sesuai dengan Pasal 1b. Ordonansi 1867 Nomor 29 / 288 Rbg / 1875 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa, jika tanda tangan suatu akta di bawah tangan sudah diakui atau dianggap diakui menurut Undang-undang, maka akta tersebut bagi yang menanda tangani (mengakui), ahli dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna.

Sehingga dalam pembuktian mengenai kepalsuan akta di bawah tangan, menurut Alexius Tantrajaya yang menggunakan akta di bawah tangan

¹²²⁾ Henry Dermawan, Advokat dan Pengacara Jakarta, Wawancara Pribadi : 20 Maret 2003

¹²³⁾ Angel Sebayang, Notaris Jakarta, 21 Maret 2003

itu sebagai bukti haruslah membuktikan akta di bawah tangan itu tidak palsu.¹²⁴⁾

Pendapat-pendapat praktisi dan ahli hukum di atas, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 138 (1) HIR, yang menyebutkan bahwa :

“Jika salah satu pihak membantah kemurnian dari alat bukti, yang diserahkan oleh lawannya, Pengadilan Negeri dapat menyelidiki tentang hal tersebut, dan kemudian menentukan, apakah alat bukti yang disangkal itu akan dipergunakan atau tidak.”

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan dihadapkan pada bukti tulisan, berupa akta notaris, jika tidak ada sangkalan tentang kepalsuan akta notaris, Hakim tidak akan mempersoalkan terlebih dahulu, mengenai kebenaran tanda tangan para pihak dalam akta, sebagaimana akta di bawah tangan, karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian :

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri sebagai akta otentik, mengingat kehadirannya itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara ;

2) Kekuatan Pembuktian Formil

- Relaas akta membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yang dilihat, didengar dan juga dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatan ;

¹²⁴⁾ Alexius Tantrajaya, Advokat dan Pengacara Jakarta, Wawancara Pribadi : 28 Maret 2003

- Partij akta membuktikan :
 - a) Kebenaran tanggal akta ;
 - b) Kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta ;
 - c) Kebenaran identitas dari orang yang menghadap.
 - d) Kebenaran tempat di mana akta itu dibuat ;

3) Kekuatan Pembuktian Materiil

- Bahwa isi dari akta itu (dianggap) dibuktikan sebagai akta itu sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh, membuat akta itu terhadap tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak daripadanya).
- Terhadap pihak ketiga, maka isi akta notaris tidaklah bersifat alat bukti sempurna melainkan sebagai alat pembuktian bebas (*bewijsmiddel motvrije bewijskracht*), di mana penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan, rasa keadilan dan kebijaksanaan Hakim.

2. Pembatalan akta notaris yang dijadikan sebagai Alat Bukti dalam Praktek pengadilan.

Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta notaris kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta

Kalau dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang bersangkutan pada dasarnya akta notaris dapat dibatalkan oleh Hakim apabila ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui, bahwa akta notaris, adalah akta otentik yang merupakan alat tertulis, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (pasal 1870 Bw). Ini berarti, bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan, oleh bukti lawan, sehingga Hakim berwenang membatalkannya.¹²⁵⁾

Hal ini terbukti dari hasil penelitian empiris, yang dapat diperoleh berupa putusan perkara perdata, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang amarnya membatalkan akta notaris, yang dijadikan sebagai alat bukti adalah sebagai berikut :

Tabel. B. 3. 1

Putusan perkara perdata yang amarnya membatalkan akta notaris dalam kurun waktu
Januari 2002 sampai dengan Desember 2002

NO.	NO. PERKARA	KLASIFIKASI	PUTUS	INKRACHT / BANDING
1.	001/G/2000	Hutang Piutang	13-06-2000	Banding
2.	039/G/2001	Perseroan	11-09-2001	Banding
3.	041/G/2001	Perseroan	11-09-2001	Banding
4.	043/G/2001	Perseroan	11-09-2001	Banding
5.	050/G/2001	Perseroan	11-09-2001	Banding
6.	054/G/2001	Hutang Piutang	04-09-2001	Banding
7.	328/G/2001	Perseroan	18-04-2001	Banding

Sumber : Pengadilan Negeri Jakarta Barat Desember 2002

¹²⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hal 126.

Jadi ada 7 perkara perdata di mana dalam amarnya membatalkan akta notaris yang diajukan sebagai alat bukti dan dimohonkan pembatalannya, dengan variasi 2 Hutang Piutang dan 5 perseroan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, antara Januari 2000 sampai Desember 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan data dalam tabel B.3.1, diklasifikasikan menurut jenis akta sebagai berikut :

1) Partij Akta

Tabel B.3.2

NO	NO. PERKARA	JENIS AKTA
		PARTIJ AKTA
1.	001/6/2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta perjanjian Menerbitkan Bank Garansi No. 75 tanggal 24 Juni 1994 ; 2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 76 tanggal 24 Juni 1994 ; 3. Akta Kuasa untuk Memasang dan mendaftarkan Hipotik-Hipotik No. 77 tanggal 24 Juni 1994; 4. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 78 tanggal 24 Juni 1994 ; 5. Akta Perjanjian Penyearahan Hak Milik Secara Fiducia No. 79 tanggal 24 Juni 1994 ; 6. Akta Penyearahan/Cessie Tagihan untuk Jaminan No. 80 tanggal 24 Juni 1994; 7. Akta Penyearahan/Cessie Tagihan Untuk Jaminan (Uang Sewa Ruangan) No. 81 tanggal 24 Juni 1994; 8. Akta Pemberian Jaminan (<i>Borgtocht</i>) (Pribadi) No. 82 tanggal 24 Juni 1994; 9. Akta Pemberian Jaminan (<i>Borgtocht</i>) (pribadi) No. 83 tanggal 24 Juni 1994; 10. Akta Berita Acara No. 84 tanggal 24 Juni 1994; 11. Akta Gadai Saham (Santoso Widjadja) No. 85 tanggal 24 Juni 1994; 12. Akta Pernyataan Subordinasi Hutang (Ratnawati Tedja) No. 86 tanggal 24 Juni 1994 ;

NO	NO. PERKARA	JENIS AKTA
		PARTIJ AKTA
		<p>13. Akta Pernyataan Subordinasi Hutang (Santoso Widjadja) No. 867 tanggal 24 Juni 1994;</p> <p>14. Akta Pernyataan Subordinasi Hutang (Santoso Widjadja) No. 87 tanggal 24 Juni 1994;</p> <p>15. Akta Perjanjian Membagi Hasil Jaminan N. 89 tanggal 24 Juni 1994 ;</p> <p>16. Akta Jual Beli Barang Modal No. 90 tanggal Juni 1994 ;</p> <p>17. Akta Surat hutang No. 91 tanggal 25 juni 1994 ;</p> <p>18. Akta pengakuan berhutang No. 30 tanggal 23 Juli 1996</p> <p>19. Surat hutang No. 31 tanggal 23 juli 1996 ;</p> <p>20. Addendum Terhadap SKMHIPOTIK No. 32 23 Juli 1996 ;</p> <p>21. Addendum Terhadap Kuasa untuk Menjual No. 33 tanggal 23 Juli 1996 ;</p> <p>22. Addendum Terhadap perjanjian Pernyataan hak Milik Secara Fiducia No. 34 tanggal 23 Juli 1996;</p> <p>23. Addendum Terhadap Penyerahan/Cessie tagihan untuk jaminan No. 35 tanggal 23 Juli 1996 ;</p> <p>24. Addendum Terhadap Penyerahan/Cessie Tagihan untuk Jaminan (Uang Sewa Ruangan) No. 36 tanggal 23 Juli 1996 ;</p> <p>25. Addendum Terhadap Penyerahan/Cessie Tagihan Asuransi No. 35 tanggal 23 Juli 1996 ;</p> <p>26. Addendum Terhadap Pemberian Jaminan (<i>Borgtocht</i>) (Pribadi) No. 38 tanggal 23 Juli 1996 ;</p> <p>27. Addendum Terhadap Gadai Saham (Santoso Widjaja) No. 40 tanggal 23 Juli 1996 ;</p> <p>28. Addendum Terhadap Pernyataan Subordinasi Hutang (Santoso Widjaja) No. 40 tanggal 23 Juli 1996 ;</p> <p>29. Addendum Terhadap Perjanjian Membagi Hasil Jaminan No. 41 tanggal 23 Juli 1996 ;</p>

NO	NO. PERKARA	JENIS AKTA
		PARTIJ AKTA
2.	039/G/2001	1. Akta Jual Beli Saham No. 26 tanggal 3 Juli 1992
3.	041/G/2001	1. Akta Pengikat Jual Beli Saham No. 24 Tanggal 3 Juli 1992; 2. Akta Pengikat Jual Beli Saham No. 25 Tanggal 3 Juli 1992;
4.	043/G/2001	1. Akta Pengikat Hibah Nomor 22 Tanggal 3 Juli 1992; 2. Akta Pengikat Hibah Nomor 23 Tanggal 3 Juli 1992;
5.	050/G/2001	1. Akta Hibah Saham No. 86 Tanggal 29 April 1991; 2. Akta Hibah Saham No. 87 Tanggal 29 April 1991; 3. Akta Hibah Saham No. 88 Tanggal 29 April 1991; 4. Akta Hibah Saham No. 89 Tanggal 29 April 1991;
6.	054/G/2001	1. Akta Pengakuan Hutang No.1 Tanggal 1 Agustus 1997; 2. Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 2 Tanggal 1 Agustus 1997;
7.	328/G/2001	1. Akta Hibah No. 31 Tanggal 3 Juli 1992; 2. Surat Kuasa No. 68 Tanggal 19 Juni 1995; 3. Perjanjian No. 67 Tanggal 19 Juni 1995 4. Pernyataan Rapat P.T Darmo No. 40 Tanggal 7 Maret 1996

2) Akta Pejabat

B.3. 3

No	No. Notaris	Jenis Akta
		Partij Akta
	Ninik	Nihil
Jumlah Nihil (tidak ada yang dibatalkan)		

Tidak ada akta pejabat yang dibatalkan dari tujuh perkara tersebut di atas

Hasil penelitian yang berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum, tetapi telah menjawab pertanyaan, tentang dapatnya akta notaris dibatalkan oleh hakim, asalkan dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijks*).

Bukti tentang kebalikannya merupakan penerobosan terhadap kekuatan pembuktian, melalui ajaran pembuktian itu sendiri. Bentuk penerobosan, terhadap kekuatan pembuktian materiil suatu akta notaris, berlangsung melalui pasal 1321 KUHperdata sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian, yaitu :

1. Kekhilafan / kesesatan (*dwaling*) Yo. Pasal 1322 KUHperdata.
2. Paksaan (*dwang*) Yo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326, dan 1327 KUHperdata.
3. Penipuan (*bedrog*) Yo. Pasal 1328 KUHperdata

Dan *Misbruik Van Omstandigheden* atau "*Undue Influence*" atau penyalahgunaan keadaan Yo. Putusan MARI nomor 1904 K / Sip 1982 dalam kasus Luhur Sindoro.

Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang amarnya membatalkan akta notaris, yang dijadikan sebagai alat bukti,

tanggapan para respondent di lapangan, tentang hal tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut Arikanti Natakusumah, Notaris di Jakarta, akta notaris dapat dibatalkan, apabila ada kesepakatan dari pihak, yang membuat akta tersebut, atau dibatalkan berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri.¹²⁶⁾

Ditambahkan oleh Arikanti Natakusumah, Pembatalan akta oleh para pihak dituangkan dalam akta pembatalan, di mana dijelaskan di dalam akta pembatalan tersebut, bahwa akta yang dibatalkan itu, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan diantara para pihak tidak saling tagih menagih lagi dan saling memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aguil de charge*).¹²⁷⁾

Lebih rinci, mengenai pembatalan akta notaris atas kesepakatan para pihak, dikemukakan oleh Angela Sebayang, Notaris di Jakarta, bahwa terlebih dahulu harus dilihat : Apakah dalam akta misalnya akta pengikatan jual beli atau kuasa menjual tercantum persyaratan yang menyatakan, bila ternyata pembeli tidak membayar tanah tersebut, sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam pengikatan jual beli, maka akta dinyatakan batal demi hukum. Kalaupun dalam akta tak dicantumkan, pula tentang hal-hal yang bisa menyebabkan akta menjadi batal, tetap saja akta tersebut bisa dibatalkan. Caranya, para pihak yang telah hadir dalam akta tersebut, harus secara

¹²⁶⁾ Arikanti Natakusumah, Wawancara Pribadi : 14 Maret 2003

¹²⁷⁾ Arikanti Natakusumah, Wawancara Pribadi : 14 Maret 2003

bersama-sama bermusyawarah dan mufakat membatalkan akta tersebut. Serta semua semua pihak tadi hadir dihadapan notaris untuk mendatangi akta pembatalan atas akta tersebut.¹²⁸⁾

Mengenai hal ini Notaris, H. Rakhmat Syamsul Rizal mengemukakan, bahwa akta notaris dapat dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak (vide Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata) atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang, dinyatakan cukup untuk itu, dalam hal tidak terpenuhinya, empat unsur kewenangan yang harus dipenuhi oleh notaris, dalam pembuatan akta notaris, yaitu :¹²⁹⁾

- a. Notaris tidak berwenang sepanjang yang mengetahui akta yang dibuat itu ;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat ;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu ;

Pendapat Rakhmat Samsul Rizal, mengenai kewenangan Notaris, diuraikan oleh G.H.S. Lumban Tobing sebagai berikut :¹³⁰⁾

¹²⁸⁾ Angela Sebayang, 21 Maret 2003

¹²⁹⁾ Rakhmat Samsul Rizal, Notaris di Jakarta, Wawancara Pribadi : 14 Maret 2003

¹³⁰⁾ G.H.S. Lumban Tobing *Op., Cit.*, hal. 49-50

a. Kewenangan yang menyangkut “Akta” yang dibuatnya ;

- 1) Notaris berwenang untuk membuat akta hanya apabila dikehendaki / diminta oleh yang berkepentingan jadi notaris tidak berwenang membuat akta secara jabatan (*ambtshalve*) ;
- 2) Notaris berwenang untuk membuat semua akta sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh Undang-undang ;

b. Kewenangan yang menyangkut “orang” ;

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan semua orang. Di dalam Pasal 20 ayat 1 P.J.N. misalnya ditentukan, bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta, di dalam mana notaris sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

c. Kewenangan yang menyangkut “tempat”

Menurut LN 1925-bib wilayah kerja Notaris adalah Daerah tingkat I / Propinsi Gawest. Tapi menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-13.HT.03.10 Tahun 1993 tentang “Pembinaan Notaris” Pasal 19 ayat 1:

Wilayah kerja Notaris, Wakil Notaris Sementara Notaris Pengganti untuk menjalankan tugas jabatannya terbatas pada daerah hukum Pengadilan Negeri yang mengawasinya.

Pasal 19 ayat 2 :

Dalam hal Notaris, Wakil Notaris Sementara dan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 menjalankan tugas jabatannya di DKI Jakarta, maka wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta.

d. Kewenangan Menyangkut “Waktu”

Notaris yang belum disumpah, sedang cuti atau dicabut haknya, tidak boleh membuat akta.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka yang dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditanda tangani oleh para penghadap (Lihat a.l. Pasal 1869 K.U.H. Perdata dan Pasal-Pasal 20, 22, 25, 28, dan 35 P.J.N).

Demikian juga halnya, bahwa apabila oleh Undang-undang untuk sesuatu “Perbuatan”, perjanjian dan ketetapan diharuskan suatu akta otentik, maka dalam hal salah satu dari persyaratan di atas tidak di penuhi, pembuatan, perjanjian atau ketetapan itu dan karenanya juga akta itu

adalah tidak sah (lihat misalnya Pasal 1171 ayat 2 dan Pasal 1682 KUHperdata).¹³¹⁾

Pendapat responden, dari kalangan Hakim, lebih menyorot pembatalan akta notaris oleh Pengadilan, seperti pendapat dari Komari, bahwa akta notaris dapat dibatalkan, bila isinya mengandung cacat hukum yang bersifat subyektif, baik sepakat maupun kecakapan (tiada sepakat jika berindikasi *dwang, dwaling dan bedrog vide* Pasal 1823 sampai 1828 KUHPerdata), sedang jika bersifat obyektif harus dinyatakan batal demi hukum.¹³²⁾

Endang Ipsiani sependapat dengan Komari, bahwa akta notaris dapat dibatalkan, jika terbukti adanya pemalsuan, adanya kesesatan dan adanya pemaksaan.¹³³⁾

Pendapat dua respondent dari kalangan Hakim tersebut, diperkuat oleh pendapat respondent dari kalangan Advokat dan pengacara, yang pada intinya sesuai dengan kaidah hukum, yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 487K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996, bahwa akta notaris tidak dapat

¹³¹⁾ Ibid. hal. 50

¹³²⁾ Komari, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Wawancara Pribadi : 20 Maret 2003

¹³³⁾ Endang Ipsiani, Hakim pengadilan Negeri Jakarta barat, wawancara pribadi : 17 maret 2003

dibatalkan, kecuali proses pembuatannya terdapat *dwang*, *dwaling en bedrog*.¹³⁴⁾

Penjelasan kaidah hukum tersebut diuraikan oleh Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, bahwa persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada 3 sebab yang membuat perjanjian tidak bebas yaitu :¹³⁵⁾

- a. Paksaan (*dwang*) yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*physic*), jadi bukan paksaan badan (*fisik*). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Jadi kalau seorang dipegang tangannya dan tangan itu dipaksa menulis tanda tangan di bawah sepucuk surat perjanjian, itu bukanlah paksaan dalam arti yang dibicarakan di sini, yaitu sebagai salah satu alasan untuk meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat itu. Orang yang dipegang tangannya secara paksaan ini tidak memberikan persetujuannya, sedangkan yang dipersoalkan di sini adalah orang yang memberikan persetujuan (*perizinan*), tetapi secara tidak bebas, seperti halnya seorang yang memberi akan persetujuannya karena ia takut terhadap suatu ancaman, misalnya akan dianiaya atau akan dibuka suatu rahasia kalau ia tidak menyetujui suatu yang dilarang. Kalau yang diundang-undang, misalnya ancaman akan digugat di depan hakim, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu paksaan. Adalah dianggap sebagai

¹³⁴⁾ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta. Penerbit P.T. Intermasa, 1985, hal 23

¹³⁵⁾ Arikanti Natakusumah, Wawancara pribadi 14 Maret 2003

mungkin, bahwa paksaan itu dilakukan oleh seorang ketiga. Lain halnya dengan penipuan, yang hanya dapat dilakukan oleh pihak lawan.

- b. Kekhilafan atau kekeliruan. Terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari pada yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.
- Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian hanya turunan saja.
- Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang Direktur opera mengadakan suatu kontrak dengan orang lain dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama, kekhilafan yang demikian itu juga merupakan alasan bagi orang yang khilaf itu untuk minta pembatasan perjanjiannya.

Adapun kekhilafan itu harus diketahui lawan, atau paung sedikit harus sedemikian rupa sehingg pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan. Kalau ia berhadapan

dengan orang yang khilaf, maka adalah tidak adil untuk membatalkan perjanjiannya. Orang yang menjual lukisan tersebut di atas mengetahui bahwa lukisan itu, bukan buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia membiarkan pembeli itu dalam kekhilafannya. Begitu pula dengan penyanyi yang disebutkan di atas, harus mengetahui bahwa direktur opera itu secara khilaf mengira telah mengadakan kontrak dengan penyanyi yang tersohor yang namanya sama.

- c. Penipuan. Terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinan. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

Misalnya : mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya dipalsukan nomor mesinnya, dan lain sebagainya. Menurut yurisprudensi, tak cukup lah kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat, seperti yang dilakukan oleh si penjual mobil di atas.

Pendapat yang berbeda dikemukakan Sumpeno dan Yahya Syam Hakim Pengadilan Negeri Jakarta barat, bahwa akta notaris tidak dapat

dinyatakan dibatalkan tapi dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³⁶⁾

Ditambahkan oleh Yahya Syam, karena Hakim Pengadilan bukanlah atasan Notaris.¹³⁷⁾

Kedua hakim tersebut, berpedoman pada putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Mei 1979, Nomor 1420K/SIP/1978, yang kaidah hukumnya mengatakan bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan atau kaidah ini juga berlaku bagi sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional di mana yang dapat membatalkan sertifikat adalah Menteri Dalam Negeri.¹³⁸⁾

Pedoman kedua hakim tersebut di atas dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam proyek pembinaan teknis yustisial untuk Panitera dan Jurusita seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta tahun 1995.

Logika hukum yang dapat ditarik dari kaidah yang terdapat pada yurisprudensi tersebut di atas adalah :

¹³⁶⁾ Sympeno dan Yahya Syam, Hukum Pengadilan Negeri Jakarta barat, Wawancara pribadi : 20 Maret 2003

¹³⁷⁾ Yahya Syam, Hukum Pengadilan Negeri Jakarta barat, Wawancara pribadi : 20 Maret 2003

¹³⁸⁾ Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung R.I, Pelatihan Tehnis Yustisial Panitera dan Jurusita / Jakarta : Mari, (1995), hal.24

- 1) Bahwa Hakim tidak dapat membatalkan secara langsung suatu ketetapan (Pasal 2 *Rechtelijke organisatie*) hakim hanya bisa menentukan bertentangan tidaknya suatu ketetapan dengan hukum dan menentukan besarnya ganti rugi (*Sehaderegoeding*). Jadi hakim hanya memperhatikan kekurangan-kekurangan yuridis dan apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*Rechtmatigheid*) ; ¹³⁹⁾
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08 September 1973, Nomor : 702K/Sip/1973, “Tidaklah tepat Hakim membatalkan akta notaris, mengingat bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya”. ¹⁴⁰⁾
- 3) Pembatalan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria (Badan Pertanahan Nasional), secara sah tidak termasuk wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti tersebut, harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi Agraria (BPN) berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Nopember 1971 nomor : 383 K/SIP/1971. ¹⁴¹⁾

¹³⁹⁾ M. Nata Saputra, *Op., Cit.*, hal. 70

¹⁴⁰⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal. 126

¹⁴¹⁾ *Ibid.* hal. 128

Namun demikian, akibat hukum dari pengertian tidak mempunyai kekuatan hukum adalah sama dengan batal demi hukum (*nietigheid*), artinya bagi hukum kekuatan yang dilakukan tidak ada, sehingga akibat perbuatan itu tidak ada karena perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan (syarat obyektif Pasal 1320 KUHPerdata).¹⁴²⁾ Sedangkan akibat hukum dari pengertian dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid*), adalah perbuatan hukum yang bersangkutan harus dianggap sah selama belum ada ketentuan hakim bahwa perbuatan itu batal, maka perbuatan-perbuatan hukum yang berdasarkan perbuatan, yang baru kemudian dibatalkan, adalah sah pula.¹⁴³⁾ Karena perbuatan yang dilakukan, bertentangan dengan syarat subyektif Pasal 1320 KUHPerdata.

Karena menurut pendapat sebagian sarjana batal demi hukum atau Van Recthwege Nietig tidak memerlukan putusan hakim, karena apa yang batal demi hukum itu, dari semua tidak pernah ada, dengan kata lain semua tidak pernah ada, dengan kata lain Rechtwege Nietig berlaku mundur sejak dibuatnya suatu akta, misalnya kesalahan yang terjadi pada isi akta, dimana para pihak memberikan atas obyek perjanjian yang pada pembuatan atau palsu. Sedangkan dapat dibatalkan atau Van Nietighbaar,

¹⁴²⁾ Subekti., *Op., Cit.* hal 17

¹⁴³⁾ Ibid hal. 68

berlaku sejak putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti ¹⁴⁴⁾.

Notaris gelar Imam Radjo Mulano, membedakan antara pengertian *nietgheid* (batal) *vernietigbaar* (dapat dibatalkan). Satu perjanjian jual beli, misalnya yang mempunyai tujuan (*causa*) terlarang, batal dengan sendirinya (*nietig*) (BW pasal 1335) (artinya tidak ada jual beli) karena sejak semula perjanjian jual beli itu batal. Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh orang-orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum (orang-orang yang belum cukup umur, orang-orang yang ditempatkan di bawah *curatele* (BW pasal 1330), dapat dimintakan pembatalan oleh Hakim (*vertieligbaar*), oleh orang-orang tertentu. Dalam hal belakangan ini tidak dapat dikatakan, bahwa tidak ada terjadi satu perjanjian. Diantara orang-orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum dengan pihak lainnya itu, timbul satu perhutangan yang sah, yang kalau perhutangan itu tidak dipenuhi, hakim akan menghukumkan penggantian kerugian, kecuali apabila wakil dari orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum itu, mengemukakan ketidakmampuan tersebut dan menuntut pembatalan dari perhutangan itu kepada hakim ¹⁴⁵⁾.

Jadi menurut penulis, tidaklah tepat bila Hakim menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap suatu akta notaris yang tidak

¹⁴⁴⁾ Liliana Budi Santoso, *Op. Cit.* hal 77

¹⁴⁵⁾ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Op. Cit.* hal 186

terpenuhi syarat subyektif Pasal 1320 KUHPerdato, terhadap hal yang demikian seharusnya hakim menyatakan akta notaris dibatalkan. Sebagaimana dimaksud kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 487 K/Pat/1991 tanggal 30 April 1996, bahwa “Akta otentik tidak dapat dibatalkan kecuali proses pembuatannya terdapat adanya *dwang*, *dwaling*, en *bedrog*”.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan: bahwa akta notaris dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum) bila tidak terpenuhi / melanggar syarat obyektif sahnyia suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdato yaitu mengenai suatu hal tertentu dan atau suatu sebab yang halal. Dan dapat dinyatakan dibatalkan oleh Hakim, bila tidak terpenuhi / melanggar syarat subyektif pasal 1320 KUHPerdato yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan atau cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Untuk lebih memeperkuat kesimpulan tersebut di atas, penulis memaparkan pertimbangan hukum, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam memutuskan pembatalan akta notaris yaiut ketujuh perkara dalam tabel B.3.1. Sebagai Perbandingan.

Namun demikian, pemaparan yang dimaksud hanyalah yang menyangkut pembatalan akta notaris, sehingga hal-hal lain yang tidak menyangkut pembatalan akta notaris, tidak penulis uraikan.

a) Putusan perkara nomor : 001/Pdt.G.2000/Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 13 Juni 2000 antara PT. Perdana Mitra CS, kawan PT. Panca Orerseas Finance Tbk. cs., Majelis Hakim H.A. Pardede, SH., Hadi Lelana, SH dan Soltoni Mohadlly, SH dengan Panitera. Pengganti Sastra Wijaya.

1) Pertimbangan hukum {dalam pokok perkara (konvensi)}.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan bukti PT. P-1 para penggugat yang sama dengan bukti T-24 Para Tergugat I dan II, memang telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat I dengan Para Tergugat I dan II yaitu: bahwa para Penggugat selaku debitur pada tanggal 24 Januari 1994 lebih menandatangani perjanjian menerbitkan Bank Garansi dengan Tergugat (PT. Bank Pan Indonesia Tbk.) dihadapan notaris Hendra Karyadi, SH dengan Akta No. 75 tanggal 24 Juni 1994 (bukti P-1 dan bukti T-24) ;

Bahwa untuk pelaksanaan perjanjian menerbitkan Bank Garansi tersebut. Selanjutnya antara para Penggugat dan tergugat II telah diterbitkan dan ditandatangani Akta Penagakuatn Berhutang No. 30 tanggal 23 Juli 1996 dihadapan notaris Hendra Karyadi, SH (Bukti P-18 dan bukti T-51) dan Surat Hutang No. 31 tanggal 23 Juli 1996 dihadapan notaris hendra Karyadi, SH (Bukti P-19 sama dengan Bukti T-52);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis memperhatikan pula bukti Penggugat yaitu bukti P-3 sama dengan T-26 dan bukti P-20 sama dengan T-27 telah terbukti bahwa benar para Penggugat memberi kuasa untuk memasang dan mendaftarkan hipotik-hipotik I tersebut di atas hanya

kepada Tergugat II (PT. Pan Inonesia Bank Tbk. Seperti disebutkan pada halaman 4 dan halaman 5 akta No. 77 tanggal 24 Juni 1994 (P-3/T-26) tersebut. Dan halaman 2 pada Akta No. 32 tanggal 23 Juli 1996 (P-20/T-27) tersebut., terbukti di dalam akta-akta tersebut. Penggugat I selaku pemberi kuasa hanyalah memberi kuasa kepada PT. Pan Indonesia Bank Tbk/Tergugat II khusus untuk memasang dengan mendaftarkan Hipotik-hipotik atas 2 (dua) bidang tanah jaminan Sertifikan HGB No. 56/Kota Bambu dan Sertifikat HGB No. 57/Kota Bambu ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-30 sama dengan T-55 berupa Sertifikat Hak tanmggungan No. 4090/1996 jo No. 74/G/Pertama/1996 tanggal 30 Agustus 1996 tersebut., ternyata selain Tergugat II, Tergugat I(PT. Panca Overeas Finamce Tbk.) (dahulu PT. Panin Overseas Finance Tbk.) tercantum pula selaku pemegang Hak Tanggungan dalam akta tersebut. Padahal para Penggugat berdasarkan bukti P-3/T-20/T-27 berupa kuasa untuk memasang dan mendaftarkan hipotik tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan atas 2 bidang tanah jaminan, dengan demikian maka terbukti maka terbukti adanya penyimpangan dalam pencantuman tergugat 5/PT. Panca Overseas Finance Tbk. (dahulu PT. Panin Overseas Finance Finance Tbk) selaku penerima Hak Tanggungan dalam akta pemberian Hak Tanggungan No. 74/G. Petamb/1996 (bukti lamp. P-30), dan karenanya berakibat akta tersebut mengandung cacat hukum dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74/G. Petamb/1996 (Bukti Lamp ;P-30/T-55) yang menjadi dasar hukumnya diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan No. 4090/1996 (P-30/T-55) tersebut, mengandung cacat hukum dan telah dianggap tidak sah, maka berakibat pula sertifikat Hak tanggungan No 0490/1996 tersebut, adalah tidak sah pula ;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan pula bukti P-16 yang sama dengan bukti T-49 yaitu Akta jual Beli Barang Modal N0. 90 tanggal 25 Juni 1994, maka dari bukti tersebut menurut majelis bahwa memang hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I dan II sebagaimana dalam Akta Jual Beli Barang Modal No. 90 tanggal 25 Juni 1994 tersebut.

Senyatanaya tidaklah pernah dilakukan pengalihan hak kepemilikan dalam arti yang sebenarnya sebagaimana dimaksud jual Bei menurut hukum mealainkan yang dilakukan adalah Jual Beli Semu / pura-pura sebagaimana komufalse terhadap hukum yang sebenarnya yakni pinjam meminjam uang dengan jaminan bangunan bedung Gapuramas, hal mana terbukti adanya perbuatan seolah-olah terjadi sewa menyewa dengan hak membeli kembali atas gedung Gapuramas pada tanggal 24 Juni 1994 (bukti P-2/T-25) yang kemudian baru dibuat Jual Beli Semu pada tanggal 25 Juni 1994 (Bukti P-16/T-49) yang menetapkan hanya pembeli sebesar 45 \$ 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus dollar Amerika Serikat) dan kemudian sebesar 45 \$ 2.400.000,- (dua juta empat ratus dollar Amearika Serikat) tetap dipegang/disimpan oleh pembeli (Tergugat I) sebagai jaminan, dengan itu maka pada dasarnya hubungan hukum antara pengugat I dengan Tergugat I dan II tersebut adalah hutang piutang, maka jual beli pura-pura / semu tersebut bertentangan dengan hukum, dengan itu sebagai konsekuensi yuridisnya atas akta-akta yang dibuat sebagai tindakan hukum semu / pura-pura yang mengikat dan merugikan para penggugat I, II dan III yaitu seperti yang disebutkan pada bukti P-3 yang sama dengan bukti T-26, P-20 yang sama dengan bukti T-27, P-31 yang sama dengan bukti T-7 dan bukti P-32 ikut batal demi hukum pula (vide yurisprudensi MARi No. 1462k/Pdt/1989 tanggal 29 Nopember 1993) ;

Menimbang bahwa oleh karena pada bukti P-16 tersebut telah terbukti bentuk jual belinya, jual beli pura-pura sesuai hukum harus batal, dengan demikian bukti P-16 (Akta Jual Beli Barang Modal No. 90 tanggal 25 Juli 1994, red) tersebut adalah cacat dan harus dibatalkan pula ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian serta fakta-fakta tersebut di atas, maka pengikatan atas seluruh aseeet-aseet milik Penggugat I, II dan III oleh Para Tergugat I dan II seperti dinyatakan pada bukti T-30, bukti T-42, bukti P-5 yang sama dengan bukti T-30, bukti P-6 yang sama dengan bukti T-32, bukti P-7 yang sama dengan bukti T-34, bukti P-8 yang sama dengan bukti T-4 yang sama dengan bukti T-28, bukti P-13 sama dengan bukti T-44 bukti P-14 yang sama dengan bukti T-46, bukti P-15 yang sama dengan bukti T-47 adalah sangat berlebihan yang didasari oleh suatu itikad yang tidak baik dari para Tergugat I, II, III karena tidak adanya rasa kebebasan

berkontrak bagi para penggugat apalagi senyatanaya atas akta-akta dimaksud pada awal pinjaman secara serentak sebanyak 17 akta harus ditandatangani pada saat itu juga tanggal 24 Juni 1994 dan kemudian untuk addendumnya secara serentak pula seperti disebutkan pada bukti-bukti P-20 sama dengan bukti T-27, bukti P-21 sama dengan bukti T-29 sama dengan bukti T-33, bukti P-24 sama dengan bukti T-35, bukti P-25 sama dengan bukti T-37, bukti P-26 sama dengan bukti T-39, bukti P-27 sama dengan bukti T-42, bukti P-28 sama dengan bukti T-45 dan bukti P-29 sama dengan bukti T-48 sebanyak 12 akta harus ditandatangani oleh para Penggugat I, II, dan III tanggal 25 Juli 1996, sehingga para Penggugat tidak sempat mempelajari isi dan maksud akta-akta yang ditandatangani itu, dengan demikian tindakan tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena telah mengandung causa yang tidak halal, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dan karenanya menurut hukum keseluruhan akta-akta yang telah dibuat dihadapan turut tergugat yaitu bukti tersebut di atas haruslah dinyatakan batal demi hukum.

2) Amar Putusan ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

(1) Menyatakan batal demi hukum atas akta-akta di bawah ini yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, yaitu :

- *Akta Perjanjian Menerbitkan Bank Garansi No.75 tanggal 24 1994;*
- *Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 76 tanggal 24 Juni 1994 ; -----*
- *Akta Kuasa untuk Memegang dan Mendaftarkan Hipotik-hipotik No. 77 tanggal 24 Juni 1994 ; -----*
- *Akta Kuasa untuk Menjual No. 78 tanggal 24 Juni 1994 ; -----*
- *Akta Perjanjian Penyearahan Hak Milik Secara Fiducia No. 79 tanggal 24 Juni 1994 ; -----*
- *AktaPenyerahan / Cessie Tagihan untuk Jaminan No. 80 tanggal 24 Juni 1994 ;*
- *AktaPenyerahan / Cessie Tagihan untuk Jaminan (Uang Sewa Ruangan) No. 81 tanggal 24 Juni 1994; -----*

- Akta Penyerahan / Cessie Tagihan Asuransi No. 82 tanggal 24 Juni 1994 ; ———
- Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) (Pribadi) No. 83 tanggal 24 Juni 1994 ; —
- Akta Berita Acara No. 84 tanggal 24 Juni 1994 ; —————
- Akta Gadai Saham (Santosa Widjaja) No. 85 tanggal 24 Juni 1994 ; —————
- Akta Gadai Saham (Ratnawati Tedja) No. 86 tanggal 24 Juni 1994 ;
- Akta Pernyataan Subordinasi Hutang (Santosa Widjaja) No. 87 tanggal 24 Juni 1994 ; —————
- Akta Pernyataan Subordinasi Hutang (Ratnawati Tedja) No. 88 tanggal 24 Juni 1994 ; —————
- Akta Perjanjian Membagi Hasil Jaminan No. 89 tanggal 24 Juni 1994 ; ———
- Akta Jual Beli Barang Model No. 90 tanggal 25 Juni 1994 ; —————
- Akta Surat Hutang No. 91 tanggal 25 Juni 1994 ; —————
- Akta Pengakuan Berhutang No. 30 tanggal 23 Juli 1996 ; —————
- Surat Hutang No. 31 tanggal 23 Juli 1996 ; —————
- Addendum Terhadap kuasa Memasang dan Mendaftarkan Hipotik-Hipotik No. 32 tanggal 23 Juli 1996 ; —————
- Addendum Terhadap Kuasa Untuk Menjual No. 33 tanggal 23 Juli 1996 ; ———
- Addendum Terhadap Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 34 tanggal 23 Juli 1996 ; —————
- Addendum Terhadap Penyerahan / Cessie Tagihan Untuk Jaminan No. 35 tanggal 23 Juli 1996 ; —————
- Addendum Terhadap Penyerahan / Cessie Tagihan Untuk Jaminan (Uang Sewa Ruangan) No. 36 tanggal 23 Juli 1996 ; —————
- Addendum Terhadap Pemberian Jaminan (Borgtocht) (Pribadi) No. 38 tanggal 23 Juli 1996 ; —————
- Addendum Terhadap Gadai Saham (Santosa Widjaja) No. 39 tanggal 23 Juli 1996 ; —————
- Addendum Terhadap Pernyataan Subordinasi Hutang (Santosa Widjaja) No. 40 tanggal 23 Juli 1996 ; —————

- *Addendum Terhadap Perjanjian Membagi Hasil Jaminan No. 41 tanggal 23 Juli 1996 ;*-----

(2) *Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk memenuhi putusan ini;*

b) Putusan perkara nomor 039/Pdt.G/2001/PN Jakarta Barat., tanggal 11 September 2001 antara Susanta Lyman (Lie Siong Tay)CS, lawan Li Loke Tai CS., majelis hakim Panto Alboin Sianipar, S.H., Ny Endang Ipsiani , SH dan M. Tuch Fatul Anam, SH., dengan Panitera pengganti Ujang Syaifullah.

1) Pertimbangan hukum (dalam pokok perkara)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian oleh para penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pembatalan Akta Jual Beli Saham Nomor 26 tanggal 3 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda PP-1 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 510/PDT/G/1998/PN. Jakarta Barat tanggal 24 Juni 1999 yang amarnya antara lain dalam pokok perkara angka 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / pernyataan Pengalihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992, di samping itu berdasarkan bukti PP-2 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Turutan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 884/PDT/1999/PT. DKI tanggal 22 November 1999 yang amarnya antara lain dalam Pokok Perkara angka 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan Pengalihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992, demikian juga berdasarkan bukti surat

PP-3 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Turutan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1305 K/PDT/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang amarnya antara lain menolak permohonan kasasi Para pemohon kasasi, yang berarti putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan Putusan pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas yang telah membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan pengalihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat PP-1, PP-2 dan PP-3 Para penggugat telah berhasil membuktikan perjanjian / Pernyataan pengalihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang dibuat oleh dan antara para penggugat dengan para Tergugat yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat semua perjanjian yang timbul dan didasarkan pada Perjanjian / Pernyataan Pengalihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Geweijdsde*) tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat PP-4 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Perjanjian / Pernyataan Peralihan / Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992, tidak telah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai bukti PP-1, PP-2 dan PP-3, antara lain dalam angka 2 menyebutkan :

- Pihak Pertama (Para Penggugat) telah mengalihkan hak / menghibahkan kepemilikannya dan melepaskan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pihak kedua (Para Tergugat) atas Perusahaan PT. Satya Raya Indah Woodbased Industries dengan jumlah saham 19. 056, dan
- Pihak Pertama (Para Penggugat) telah mengalihkan hak / menghibahkan kepemilikannya dan melepaskan kepentingan

baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pihak kedua (Para Tergugat) atas perusahaan-perusahaan dan sahamnya sebagai berikut :

- 1. PT. Sukses Sumatra Timber dengan jumlah saham 4.056.*
- 2. PT. Pulogadung Steel dengan jumlah saham 1.120.*
- 3. PT. United Waru Biscuit Manufacturing dengan jumlah saham 432.*
- 4. PT. Yamaja Rimba dengan jumlah saham 300*
- 5. PT. Delapan-Delapan dengan jumlah saham 900.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-4 berupa Perjanjian / pernyataan pengalihan Hak / hibah tanggal 3 Juli 1992 yang telah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka semua jenis pengalihan hak baik berupa jual beli saham maupun Hibah Saham yang bermuat di dalam Pasal 2 Perjanjian / Pernyataan pengalihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 yang sudah dilakukan harus dibatalkan, oleh karenanya dengan Majelis hakim berpendapat petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-5 yang sama dengan bukti surat T.I.III.IV-1 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Akta Jual Beli Saham Nomor 26 tanggal 3 Juli 1992, antara Penggugat IV (Osbert Lyman) dengan Tergugat IV (Josephine Li Hwa Yue) atas 300 (tiga ratus) saham PT. Yamaja Rimba di Jakarta yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian yang timbul dan didasarkan pada Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 yang telah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Akta Jual Beli Saham Nomor 26 tanggal 3 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat yang ada hubungannya dengan hal tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli Saham Nomor 26 tanggal 3 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat untuk menyatakan Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini haruslah dikabulkan ;

2) Amar putusan

Mengadili

Dalam pokok perkara ;

(1) Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi akta jual Beli Saham No. 26 tanggal 3 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) ;

(2) Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini ;

- c) Putusan perkara nomor 041/Pdt.G/2001/PN. Jakarta Barat, tanggal 1 September 2001 antara Susanta Lyaman (Lie Siong Tay) cs, lawan Li Loke Tai cs, Majelis Hakim Panto Alboin Sianipar, SH., Ny Endang Ipsiani, S.H., dan M. Tuchfatul Anam, S.H., dengan Panitera Pengganti I Gde Wijaya Astika, S.H.,

1) Pertimbangan hukum (dalam Pokok Perkara)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian oleh para penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 3 Juli 1992 dan Akta Pengangkatan Jual Beli Saham Nomor 25 tanggal 3 Juli 1992,

yang dibuat Rachmat Santoso, SH Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda tangan PP-1 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Turutan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 510/Pdt.G.1998 Pengadilan Negeri Jakarta Barat., tanggal 24 Juni 1999 yang amarnya antara lain dalam pokok perkara angka 3 membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan Hak / Hibah tertanggal 3 juli 1992, di samping itu berdasarkan bukti PP-2 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 884/Pdt/1999/PT. DKI tanggal 22 Nopember 1999 yang amarnya antara lain dalam pokok perkara angka 3 membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992, demikian juga berdasarkan bukti surat PP-3 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1305 K/Pdt/2000 tersebut 20 Juni 2000, yang amarnya antara lain menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi, yang berarti Putusan Mahkamah Agung tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas telah membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian/Peralihan hak/hibah tanggal 3 Juli 1992.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat PP-1, PP-2 dan PP-3 para penggugat telah berhasil membuktikan Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang dibuat oleh dan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian majelis hakim berpendapat semua perjanjian yang timbul dan didasarkan pada Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang telah dibatalkan oleh putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat

petitum gugatan yang dan hubungannya dengan hal ini haruslah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-4 berupa foto copy yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992, yang telah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai bukti PP-1, PP-2 dan PP-3, antara laian dalam angka 2 menyebutkan :

- *Pihak Pertama (Para Penggugat) telah mengalihkan hak / menghibahkan kepemilikannya dan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pihak kedua (Para Tergugat) atas Perusahaan PT. Satya Raya Indah Woodbased Industries dengan jumlah saham 19.056, dan*
- *Pihak pertama (Para Penggugat) akan mengalihkan hak menghibahkan kepemilikan dan melepaskan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak kedua (Para Tergugat) atas perusahaan-perusahaan dan sahamnya sebagai berikut :*

- 1. PT. Sukses Sumatra Timber dengan jumlah saham 4.056.*
- 2. PT. Pulogadung Waru Biscuit Manufacturing dengan jumlah saham 432.*
- 3. PT. Yamaja Rimba dengan jumlah saham 300*
- 4. PT. Delapan-Delapan dengan jumlah saham 1.124.*
- 5. PT. Serimbang Sawmill dengan jumlah saham 900.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-4 berupa Perjanjian / Pernyataan Pengalihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 yang telah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka semua jenis Pengalihan hak baik berupa Jual Beli Saham maupun Hibah Saham yang terbuat di dalam angka 2 Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan yang ternyata juga sudah dilakukan harus di

batalan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-5 dan PP-6 yang sama dengan bukti surat T.I.III.IV.V-1 dan T.I.III.IV-2 berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 3 Juli 1992 antara Roysin Lyman (Penggugat III) dengan Josephine Li Hwa Yue (Tergugat IV), dan Akta Pengikat Jual Beli Saham Nomor 25 tanggal 3 Juli 1992, antara Osbert Lyman (Penggugat IV) dengan Josephe Li Hwa (Tergugat IV) atas 4.056 saham PT. Sukses Sumatera Timber di Jakarta (Turut Tergugat) yang merupakan Perjanjian yang timbul dan didasarkan pada Perjanjian / Pernyataan Pengalihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 yang telah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Akta perjanjian Jual Beli Saham Nomor 24 dan Nomor 25 tanggal 3 Juli 1992 kedudukannya dibuat dihadapan Rahmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan para penggugat yang ada hubungannya dengan hal tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Jual Beli Saham, Nomor 24 dan Nomor 25 tanggal 3 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Rahmat Santoso SH. Notaris di Jakarta (Turut tergugat) telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan para penggugat untuk menyatakan Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini haruslah dikabulkan ;

2) Amar Putusan:

Mengadili :

Dalam pokok perkara

1. *Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi akta-akta sebagai berikut :*

- *Akta pengikatan Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 3 Juli 1992.*
- *Akta pengikatan Jual Beli Saham No. 25 tanggal 3 Juli 1992, yang keduanya dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH Notaris di Jakarta (Turut tergugat).*

2. *Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini ;*

d) Putusan perkara nomor 043/Pdt.G/2001/Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 11 September 2001 antara Susanta Lyman (Lie Siong Tay) cs lawan Li Loke Tai cs., Majelis Hakim Panto Alboin Sianipan, SH, Ny Endang Ipsiani, SH dan M. Tuchfatul Anam, SH dengan Panitera pengganti I.Gde Wijaya Astika, SH.

1) *Pertimbangan hukum (Dalam Pokok Perkara)*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian oleh para penggugat, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan menentukan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Pembatalan Akta pengikatan Hibah Saham Nomor 22 tanggal 3 Juli 1992, yang Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 3 Juli 1992, yang keduanya dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda PP-1 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 510/Pdt.G/1998/Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 juni 1999 yang amarnya antara lain dalam pokok perkara angka 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan Pengalihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992, disamping itu berdasarkan bukti PP-2 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 884/Pdt/1999/PT. DKI tanggal 22 Nopember 1999 yang amarnya antara lain dalam pokok perkara angka 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan Peralihan hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992, demikian juga berdasarkan bukti surat PP-3 yang berupa foto copy yang dengan aslinya Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1305 K/Pdt/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang amarnya antara lain menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi, yang berarti putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas telah membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Peralihan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat PP-1, PP-2 dan PP-3 Para Penggugat telah berhasil membuktikan Perjanjian Pernyataan peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang dibuat oleh dan antara para Penggugat dan Para Tergugat telah di batalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat semua perjanjian yang timbul dan didasarkan pada Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang telah di batalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewejsde) tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-4 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992, yang telah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai bukti PP-1, PP-2 dan PP-3 antara lain dalam angka 2 menyebutkan :

- Pihak pertama (Para Penggugat) telah mengalihkan hak / menghibahkan kepemilikannya dan melepaskan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak kedua (Para Tergugat) atas Perusahaan PT. Satya Raya Indah Woodbased Industries dengan jumlah saham 19.056, dan
- Pihak pertama (Para Penggugat) akan mengalihkan hak / menghibahkan kepemilikannya dan melepaskan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak kedua (Para Tergugat) atas perusahaan-perusahaan dan sahamnya sebagai berikut:
 1. PT. Sukses Sumatera timber dengan jumlah saham 4.056
 2. PT. Pulogadung dengan jumlah saham 1.120
 3. PT. United Waru Biscuit Manufacturing dengan jumlah saham 432.
 4. PT. Yamaja Rimba dengan jumlah saham 300
 5. PT. Delapan-Delapan dengan jumlah saham 1.124
 6. PT. Senimbang Sawmill dengan jumlah saham 900.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-4 berupa Perjanjian / Pernyataan Pengalihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 y telah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka semua jenis pengalihan hak baik berupa Jual Beli Saham maupun Hibah Saham yang bermuat didalam angka 2 Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah baik tanggal 3 Juli 1992 baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan yang ternyata juga sudah dilakukan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat T.I.III.IV-1 dan T.I.III.IV-2 berupa foto copy yang telah di bubuhi bea materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Akta Pengikatan Hibah Saham No 22 tanggal 3 Juli 1992, dari Susanta Lyman (PenggugatI) keapada Josephine Li Hwo Yue (Tergugat IV) atas 715 (tujuh ratus lima belas) saham PT.

Delapan-Delapan di Jakarta akan Akta Pengikatan Jual Beli Saham No 23 tanggal 3 Juli 1992 antara Osbert Lyman (Penggugat IV) dengan Josephine Li Hwa Yue (tergugat IV) atas 409 (empat ratus sembilan) lembar saham PT. Delapan-Delapan di Jakarta, keduanya pada Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 yang telah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Akta Hibah Saham Nomor 22 tanggal 3 Juli 1992 dan Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 3 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) gharus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Majelis hakim, berpendapat petitum gugatan para Penggugat yang ada hubungannya dengan hal tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta pengikatan hibah Saham Nomor 22 tanggal 3 Juli 1992 dan Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 3 Juli 1992, yang keduanya dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (turut Tergugat) telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat untuk menyatakan Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini haruslah dikabulkan;

2) Amar putusan :

Mengadili :

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Akta-Akta sebagai berikut :
 - Pengikatan Hibah Saham Niomor 22 tanggal 3 Juli 1992;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 3 Juli 1992, yang keduanya dibuat dihdapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut tergugat);
2. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;

- e) Putusan perkara Nomor 050/Pdt.G/2001/Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 2001 antara Susanta Lyman (Lie Siong Tay)CS. Lawan Li Loke Tai CS., Majelis Hakim Panto Alboin Sianipar, Sh., Ny Endang Ipsiani SH dan M. Tuchfatul Anam, SH., dengan Panitera pengganti I. Gde Wijaya Astika, SH.

1) Pertimbangan Hukum (dalam pokok perkara)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pembatalan Akta hibah Saham No 86 dan No 87 tanggal 29 April 1991 dan Akta Jual Beli Saham No. 88 dan 89 tanggal 29 April, yang kesemuanya dibuat di hadapan rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat), meskipun dalam posita gugatan Para Penggugat yang dimohonkan pembatalan adalah Akta hibah Saham Nomor 86, Nomor 87, Nomor 87 dan Nomor 89 tanggal 29 April 1991, akan tetapi perubahan Pembatalan Para Penggugat dalam Kesimpulan telah disempurnakan yaitu Pembatalan Akta Hibah Saham Nomor 86 dan Nomor 87 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 88 dan Nomor 89, semuanya tanggal 29 April 1991, dan mengenai hal ini juga tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, di samping itu berdasarkan bukti surat dari para Penggugat yang diberitanda PP-7 dan PP-8 yang sama dengan bukti Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV y diberi tanda T.I.III.IV.IV/3 dan T.I.III.IV/4 adalah berupa Akta Jual Beli Saham Nomor 88 dan Nomor 89 tanggal 29 April 1991 yang keduanya dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Pembatalan Akta Hibah Saham Nomor 86 dan Nomor 87 tanggal 29 April 1991 dan Pembatalan Akta Jual Beli Saham Nomor 88 dan Nomor 89 tanggal 29 April 1991, dengan demikian dalam amar putusan akan menyesuaikan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda PP-1 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 510/Pdt.G.1998/ Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juni 1999 yang amarnya antara lain dalam pokok perkara angka 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan Peralihan hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992, di samping itu berdasarkan bukti Pp-2 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Turunan Putusan Pengadilan tinggi Jakarta Nomor 884 / Pdt/1999/PT. DKI tanggal 22 Nopember 1999 yang amarnya antara lain dalam pokok perkara angka 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992, demikian juga berdasarkan bukti surat PP-3 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya antara lain menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi, yang berarti Putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas yang telah membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian / Pernyataan Peralihan hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat PP-1, PP-2 dan PP-3 Para Penggugat telah berhasil membuktikan Perjanjian Peralihan hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang dibuat oleh dan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat semua perjanjian yang merupakan bagian dan tunduk pada Perjanjian / Pernyataan Peralihan hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewejsde) tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-4 yang berupa foto copy yang telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Perjanjian / Pernyataan

Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992, yang telah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai bukti PP-1, PP-2 dan PP-3 antara lain dalam angka 2 menyebutkan ;

- *Pihak Pertama (Para Penggugat) telah mengalihkan hak / menghibahkan kepemilikan dan melepaskan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak kedua (para Tergugat) atas Perusahaan PT. Satya Raya indah Woodbased industries dengan jumlah saham 19.056, dan*
- *Pihak pertama (Para Penggugat) akan mengalihkan hak / menghibahkan kepemilikan dan melepaskan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak kedua (Para Tergugat) atas perusahaan-perusahaan dan sahamnya sebagai berikut :*
 1. *PT. Sukses Sumatera timber dengan jumlah saham 4.056*
 2. *PT. Pulogadung dengan jumlah saham 1.120*
 3. *PT. United Waru Biscuit Manufacturing dengan jumlah saham 432.*
 4. *PT. Yamaja Rimba dengan jumlah saham 300*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-4 berupa Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 yang telah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka semua jenis pengalihan hak baik berupa Jual Beli Saham maupun Hibah Saham yang termuat di dalam angka 2 Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 baik yang telah dilakukan maupun yang akan di lakukan yang ternyata juga sudah dilakukan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda PP-5, PP-6, PP-7 dan PP-8 yang sama dengan surat bukti T.I.III.IV.IV-1, T.I.III.IV-2, T.I.III.IV-3, T.I.III.IV-4 berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai Saham Nomor 86 tanggal 29 April 1991 dari Christina Gussie (Penggugat II)

kepada Josephine Li Hwa Yue (Tergugat IV) atas 2.779 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) lembar saham PT. Satya Raya Indah Woodbased Industries di Jakarta, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 88 tanggal 29 April 1991 antara Osbert Lyman (Penggugat IV) dengan Josephine Li Hwa Yue (Tergugat IV) atas 7.146 (tujuh ribu seratus empat puluh enam) lembar saham PT. Satya Raya Indah Woodbased Industries di Jakarta, serta Akta Jual Beli Saham Nomor 6.749 (enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) lembar saham PT. Satya Raya Indah Woodbased Industries di Jakarta, kesemuanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (turut Tergugat) yang merupakan perjanjian yang tercantum dan menjadi bagian Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992, khususnya angka 2 yang secara khusus menunjukkan pengalihan saham tersebut di atas, meskipun dibuat sebelum tanggal 3 Juli 1992, yaitu dibuat pada tanggal 29 April 1991, akan tetapi tetap terikat dan merupakan bagian dari Perjanjian / Pernyataan Peralihan hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 yang telah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Akta Hibah Saham Nomor 86 tanggal 29 April 1991, Akta Hibah Saham Nomor 87 tanggal 29 April 1991, Akta Jual Beli Nomor 89 tanggal 29 April 1991, kesemuanya di buat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat petium gugatan para penggugat yang ada hubungannya dengan hal tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Saham Nomor 86 tanggal 29 April 1992, Akta hibah Saham Nomor 87 tanggal 29 April 1991, Akta Jual Beli Saham Nomor 88 tanggal 29 April 1991 akta jual beli nomor 89 tanggal 29 April 1991 kesemuanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan para penggugat untuk menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Saham Nomor 86 tanggal 29 April 1991, Akta Hibah Saham 87 tanggal 29 April 1991, Akta Jual Beli Saham Nomor 88 tanggal 29 April 1991 akta jual beli nomor 89 tanggal 29 April 1991 kesemuanya di buat di hadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta

(Turut Tergugat) telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan para penggugat untuk menghukum turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini haruslah dikabulkan ;

2) *Amar Putusan :*

Mengadili:

1. *Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi akta-akta sebagai berikut :*

- *Akta Hibah Saham Nomor 86 tanggal 29 April 1991 ;*
- *Akta Hibah Saham Nomor 87 tanggal 29 April 1991 ;*
- *Akta jual beli nomor 88 tanggal 29 April 1991;*
- *Akta Jual Beli Saham Nomor 89 tanggal 29 April 1991 ;*

Yang semuanya dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH Notaris di Jakarta (Turut tergugat)

2. *Menghukum Turut tergugat untuk taat dan patuh putusan perkara ini.*

- f) Putusan Nomor 054/Pdt.G/2001/Pengadilan Negeri Jakarta Barat., tanggal 4 September 2001 antara Ny Petronella F. Gini CS lawan PT. Bank Kesawan CS., Majelis Hakim Rizet Benyamin Rafael, SH., Sumpeno, Sh dan Parulian Hutahaen, SH. Dengan Panitera Pengganti Sabda Siregar, SH.

1) *Pertimbangan hukum (dalam pokok perkara)*

Menimbang, bahwa pembantah – I mengakui telah menerima pinjaman berupa uang tunai berjumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari

terbantah – II dan Terbantah – III dan telah pula menyerahkan kepada Terbantah II an Terbantah III berupa surat-surat asli berupa 1 (satu) sertifikat HGB No. 2020 atas nama Hendrik Akihari, SE, 1 (satu) surat IMB, 1 (satu) surat keluarga 1 (satu) Akte kematian, 1 (satu) surat keterangan para ahli waris, 1 (satu) denah ruma dan 1 (satu) Akte pernikahan selain itu Pembantah – I juga mendatangkan beberapa blanko kosong yang diberikan oleh Terbantah – II dan Terbantah – III ;.

Menimbang, bahwa Pembantah – I berkenaan dengan Terbantah – II dan Terbantah III paa bulan April 1997 sedangkan alm. Hendrik Akihari, SE berdasarkan surat bukti bertanda PP-6 dan PP-7 meninggal dunia pada tanggal 6 maret 1995 sehingga tidak masuk akal apabila dalam Akta Jual Beli No 118 / Kebon Jeruk / 1994, tanggal 14 Maret 1994 Alm. Hendrik Akihary, SE ikut mendatangkan akta di maksud, hal ini dikuatkan pula oleh bukti bertanda PP-23 berupa hasil laboratoris dari instansi POLRI yang menyebutkan bahwa tanda tangan yang tertera pada kolom istri penjual Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah non identik atau dibuat / ditandatangani oorang yang berbeda dengan Akta Nomor 188 / Kebon Jeruk / 1994 tanggal 14 Maret 1994 adalah bukan produk dari PPAT M. Kloster Silitonga, BBA ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda PP-21 berupa kalender masehi menunjukkan tanagagal 14 Maret 1994 jatuh pada hari Senin dan pada jhari dan tanggal tersebut adalah hari libur nasional bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1414 H. sehingga adalah janggal kalau pada hari dan tanggal tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah / Kantor Pelayanan Umum melakukan aktivitas ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.IV-1 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 118 / Kebon Jeruk ditunjukkan kepada Terbantah – IV oleh Fajar rahman Manager Administrasi PT. Bank Kesawan tanggal 16 Juli 1998 langsung sibantah bahwa akte dimaksud tidak pernah dibuat dan didaftar dalam buku Agenda PPAT M. K. Silitonga, BBA ;

Menimbang, bahwa surat buktu bertanda T.IV-2 di hubungkan dengan surat bukti bertanda PP-21 pada hari Senin tanggal 14 Maret 1994 PPAT M. K. Silitonga, BBA tidak ada kegiatan serta tidak ada pembuatan akta bahkan semua

aktivitas pada kantor PPAT M. K. Silitonga, BBA berdasarkan lembar daftar agenda / protokol akte terhenti sejak tanggal 12 Maret 1994 sampai dengan tanggal 21 Maret 1994 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda Tidak-VI-4, Tidak-VI-5 dan Tidak-IV-6 membuktikan bahwa PPAT M. K. Silitonga, BBA tidak pernah membuat, menerbitkan, mendatangkan dan mendaftarkan dalam buku agenda / protokol PPAT Akte Jual Beli Nomor 118 / Kebon Jeruk / 1994 tanggal 14 Maret 1994 ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan yang disebutkan di atas, maka majelis berkesimpulan Akte Jual Beli Nomor 118 / Kebon Jeruk / 1994 tanggal 14 Maret 1994 diperoleh Terbantah – II tidak dengan cara-cara dan prosedur jukum yang benar, oleh keteranganya Akta Jual Beli tersebut cacat hukum serta batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa karena Akte Jual Beli Nomor 118 / Kebon Jeruk / 1994, tanggal 14 Maret 1994 batal demi hukum maka semua peristiwa hukum dan perikatan-perikatan tidak timbul berdasarkan Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum (Akta Pengakuan hutang Nomor 1 tanggal 01 Agustus 1997 jo Akte kuasa membebankan hak Tanggungan Nomor 2 tanggal 01 Agustus 1997 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH dan Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 307 / Kebayoran / 1997, tanggal 29 Agustus 1997, yang dibuat PPAT Aryani lamoen Redojo, SH jo Sertifikat hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 5522 / 1997, tanggal 11 September 1997 yang dibuat Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Barat, red. Adalah batal demi hukum, oleh karenanya para pembantah secara hukum harus dilindungi hak-haknya serta para pembantah adalah pembantah yang benar dan baik ;

Menimbang, bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 118 / Kebon Jeruk / 1994, tanggal 14 Maret 1994 batal demi hukum, maka proses balik nama yang dilakukan oleh Terbantah II tanggal 4 Juli 1997 terhadap sertifikat HGB Nomor 2020, Desa Meruya Ilir, Kebon Jeruk Jakarta barat haruslah dikembalikan pada status dan keadaan semula.

UPT-PUSTAK-UNDIP

2) Amar putusan

Mengadili

Dalam pokok perkara

- *Menyatakan batal demi hukum Akte Jual Beli Nomor 118 / Kebon Jeruk/ 1994, tanggal 14 Maret 1994 tertulis dibuat PPAT M. K. Silitonga, BBA ;*
- *Menyatakan balik nama pada sertifikat nomor 2020 / Meruya Ilir / Jakarta Barat, yang dicatat oleh Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Barat No. DP. 20575197, tanggal 4 Juli 1997 ke atas nama Hayndry Prasetio adalah tidak sah dan batal demi hukum oleh karenanya wajib dihapus / dicoret serta dikembalikan dalam keadaan semula ;*
- *Menyatakan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 307 / Kembangan / 1997, tanggal 28 Agustus, yang dibuat PPAT Aryani Lamoen Redjo, SH, jo. Sertifikat Hak tanggungan Peringkat Pertama No. 5522/1997, tanggal 11 September 1997 yang dibuat Badan Pertanahan nasional wilayah Jakarta Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para Pembantah ;*
- *Menyatakan Akte Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 01 Agustus 1997 jo. Akte Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 2, tanggal 01 Agustus 1997 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH sepanjang menyangkut urusan penjaminan / pembebanan haka atanggungan adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada para Pembantah ;*

- g) Putusan perkara Nomor 328/Pdt.G/2001/Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 18 April 2002 antara Susanta Lyman (lie Siong Tay) Cs, lawan Li Loke Tai CS., Majelis Hakim Sumpeno, SH., Parulian Hutahaen, Sh, dan R. Benyamin Rafael, SH, dengan Panitera Pengganti Suprapti, SH.

1) Pertimbangan hukum (dalam pokok Perkara)

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan para penggugat adalah agar supaya tergugat I dampai dengan tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari paranya dihukum untuk menyerahkan hak kepemilikan atas saham-saham PT. Darmo Permai yang kesemuanya berjumlah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) lembar saham kepada para penggugat ;

Menimbang, bahwa dituntutnya tergugat I sampai dengan tergugat IV untuk menyerahkan hak kepemilikan atas saham-saham sebagaimana dimaksud adalah dikarenakan saham-saham sebagaimana dimaksud adalah merupakan salah satu isi dari Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 yang dibuat antara para penggugat dengan tergugat I sampai dengan tergugat IV sebagaimana di muat dalam pasal 6-nya;

Menimbang, bahwa di dalam salah satu ketentuannya yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 dari perjanjian pengalihan hak / hibah tanggal 3 Juli 1992 sebagaimana dimaksud, telah ditegaskan abahwa jikalau pihak kedua, dalam hal ini tergugat I sampai dengan tergugat IV bermaksud hendak mengalihkan perusahaan tersebut (dimuat dalam pasal 2-nya) kepada pihak ketiga, maka pihak kedua wajib menawarkan terlebih dahulu kepada pihak pertama, dalam hal ini kepada para penggugat (vide bukti PP-5) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Perjanjian / Peralihan hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis telah meneliti dengan seksama terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para penggugat, dalam hal ini adalah bukti PP-1, PP-2, PP-3 dan PP-4, yang kesemuanya adalah berujud putusan badan peradilan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga upaya hukum luar biasa yaitu putusan Mahkamah Agung republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan kembali, putusan badan peradilan mana hingga sekarang ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa beberapa amar putusan Badan Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (dalam perkara yang terdahulu) yaitu terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 884/Pdt/1999/ PT. DKI tertanggal 22 Nopember 1999 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 510/Pdt.G/1998/Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 24 Juni 1999, telah dinyatakan bahwa mereka itu (maksudnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam perkara ini) telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
2. bahwa Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebaaelumnnya maka Perjanjian / Pernyataan Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 sebagaimana di aksud adalah merupakan Perjanjian / Pernyataan / Peralihan Hak / Hibah yang dibuat oleh para Penggugat selaku Pihak pertama, dengan para tergugat selaku Pihak Kedua ;

Menimbang bahwa, oleh karena Perjanjian / Pernyataan / Peralihan Hak / Hibah, tertanggal 3 Juli 1992 sebagaimana dimaksud telah dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan badan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka secara mutatis mutandis dan demi kepastian hukum serta agar putusan dalam perkara ini tidak sering tumang tindih dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud, terhadap isi Perjanjian / Pernyataan / Peralihan Hak / Hibah sebagaimana di maksud, harus pula dinyatakan batal dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu isi dari Perjanjian / Pernyataan / Peralihan Hak / Hibah tertanggal 3 Juli 1992 sebagaimana dimaksud adalah menyangkut hak

kepemilikan atas saham-saham PT. Darma Permai sebanyak 384 lembar saham, yang dilakukan oleh pihak pertama, dalam hal ini Para Penggugat kepada pihak kedua, dalam hal ini Tergugat I sampai dengan tergugat IV, maka pengoperan / peralihan kepemilikan saham dari pihak pertama kepada pihak kedua tersebut ikut pula menjadi batal karenanya ;

Menimbang, bahwa lebih jauh setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sepanjang berkaitan erat dengan pokok perkara ini, maka menyangkut pengoperan / peralihan kepemilikan saham tersebut direalisasikan dengan beberapa akta, yaitu :

1. Akta Hibah No. 31 tertanggal 3 Juli 1992 yang dibuat dihadapan rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) vide bukti PP-6 dan bukti T.I, T.II dan T. IV-1 ;
2. Surat Pernanjian No. 67 tertanggal 19 juni 1995 yang dibuat dihadapan Nurul Hidajati Handoko, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) II), vide bukti PP-8 ;
3. Surat kuasa No. 68 tertanggal 19 Juni 1995 yang dibuatdihadapan Nurul Hidajati Handoko, SH. (Turut TergugatII), vide bukti PP-7 ;
4. Pernyataan keputusan rapat PT. Darma Permai No. 40 tertanggal 7 Maret 1996 yang dibuat dihadapan benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat), vide bukti PP-9 dan bukti-bukti T.I, T.III dan T.IV-3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa akta sebagaimana tersebut di atas adalah bersumber dari pelaksanaan Perjanjian / Pernyataan / Peralihan Hak / Hibahtanggal 3 Juli 1992, sedangkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perkara yang sudah diputus terdahulu sedah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, maka akta-akta karenanya yang tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan nbukti menyangkut perjanjian tertanggal 18 April 1997, bukti mana adalah diajukan oleh Para Penggugat dan juga oleh

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (vide bukti PP-10 dan juga bukti T.I, T. III dan T.IV-2) ;

*Meaniambang, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV maka surat perjanjian tanggal 3 Juli 1992 tidak lagi dapat dibatalkan, oleh karena di dalam pasal 4 dari perjanjian tertanggal 18 April 1997 tersebut telah disebutkan bahwa **"Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 3 Juli 1992 dengan demikian telah dilaksanakan sepenuhnya"**;*

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut hemat Majelis tidaklah dapat diterima mengingat perjanjian tertanggal 3 Juli 1992 sebagaimana dimaksud pernah diuji dihadapan badan Peradilan, bahkan hingga tingkat upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, di mana hasil akhir dan perjanjian tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya alasan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV disamping alasan tersebut di atas juga surat perjanjian tertanggal 18 April 1997 yang olehnya dianggap merupakan final settlement sebagai bentuk perjanjian baru yang mengakhiri isi Perjanjian / Pernyataan / Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992, pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara terdahulu, yang hasilnya tetap saja Perjanjian / Pernyataan / Peralihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Majelis menilai bahwa diajukannya surat perjanjian tertanggal 18 April 1997 dalam perkara ini hanyalah merupakan pengulang-ulangan bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena akta-akta surat pernyataan perjanjian sebagaimana di maksud adalah merupakan produk para Notaris, maka selayaknya apabila tutur Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III di hukum untuk taat dan patuh terhadap putusan ini ;

2) Amar putusan :

Dalam pokok perkara :

1. *Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;*
 - a. *Akta Hibah No. 31 tertanggal 3 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I) ;*
 - b. *Surat kuasa No. 68 tertanggal 19 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) ;*
 - c. *Perjanjian No. 67 tertanggal 19 juni 1995 yang dibuat dihadapan Nurul Hidajati Handoko, SH. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) ;*
 - d. *Pernyataan rapat PT. Darmo Permai No. tertanggal 7 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakrta (turut tergugat III) ;*
2. *Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III untuk taat dan patuh terhdap putusan ini ;*

C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya

Tanggung jawab yang diemban notaris tidak lain karena notaris telah disumpah untuk melakukan tugas sebaik-bainya yang berbunyi ;

1. **Bahwa saya akan patuh setia kepada Negara republik Indonesia dan Undang-undang Dasarnya.**
2. **Bahwa saya akan menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya.**

3. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak ;
4. Bahwa saya akan menepati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan;
5. Bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan tadi;
6. Saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan mengangkatan saya, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalil apapun juga, tidak pernah telah memberikan atau menjanjikan sesuatu pun tidak akan memberikan atau menjanjikan siapapun juga.

Dengan adanya sumpah tersebut, maka notaris juga tidak dapat mengungkapkan apa yang telah ia ketahui pada isi akta maupun jal-hal yang dibicarakan para persiapan pembuatan akta, oleh sebab itu jika terjadi suatu perkara yang buktinya adalah akta notaris, notaris tidak dapat dijadikan saksi berhubung dengan rahasia jabatannya. Dengan demikian hakimlah yang berhak menilai apa dan bagaimana isi akta notaris.

Kapasitas notaris sebagai pihak dalam perkara-perkara tersebut, adalah merupakan kebebasan yang diberikan hukum kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus ditempatkan sebagai pihak Tergugat / Turut

Tergugat / Terbantah, atau dengan kata lain, Penggugat mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa-siapa yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara.¹⁴⁶⁾

Logika hukum, yang dijadikan alasan penggugat / pembantah yang menjadikan notaris sebagai pihak, karena dalam melaksanakan tugasnya, notaris saat ini, bukan saja bertindak hanya berpedoman pada asas kebebasan berkontrak. Notaris juga berfungsi sebagai filter dari masyarakat di dalam pembuatan suatu akta dengan berpedoman pada pasal 7 peraturan Jabatan Notaris.

Sebagai konsekuensinya, Notaris berkewajiban untuk mengetahui peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, bahkan kalau mungkin, peraturan yang bersifat Internasional. Notaris harus mengetahui hukum yang berlaku pada para pihak (pihak-pihak yang meminta bantuannya untuk membuat akta, oleh karena itu pemerintah menetapkan untuk bisa menjadi seorang notaris, seorang sarjana hukum diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal kenotariatan.¹⁴⁷⁾

Terlepas dari semuanya itu, harus diakui pula bahwa notaris sebagai manusia pada umumnya masih mungkin berbuat kesalahan.

¹⁴⁶⁾ Endang Ipsiani, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Wawancara pribadi

¹⁴⁷⁾ Arkanti Natakusumah Notaris di Jakarta Wawancara pribadi

Jika notaris terbukti melakukan sesuatu hingga merugikan orang lain (klienya), maka ia harus membayar ganti rugi dan bunga. Dengan demikian notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas akta yang dibuatnya sesuai dengan wewenangnya yang meliputi : ¹⁴⁸⁾

1. Notaris bertanggung jawab sepanjang akta yang dibuat itu (Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 1 PJN jo Pasal 7 PJN) ;
2. Notaris bertanggung jawab sejauh akta itu dibuat diwilayah kerjanya (Pasal 9 PJN)
3. Notaris harus mengenal, mengetahui tentang orang untuk kepentingan siapapun akta yang dibuatnya itu (Pasal 20 jo, 21 PJN)
4. Notaris harus bertanggung jawab sepanjang waktu pembuatan akta yang dibuatnya (Pasal 6 dengan, 6b, 18 PJN)
5. Kesalahan dalam bentuk akta (Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 PJN)
6. Pasal 60 PJN

Semua pelanggaran dalam reglemen ini, untuk mana tidak diadakan hukuman tertentu, dihukum dengan denda dari Rp. 10,- sampai Rp. 50,-.

¹⁴⁸⁾ Rakhmat Syamsul rizal, notaris di Jakarta, wawancara pribadi :

Kecuali dalam hal-hal, di mana yang demikian ditentukan secara tegas dalam reglemen ini, para notaris dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan, jika akta yang dibuat dihadapan mereka, karena tidak memenuhi syarat mengenai bentuk, dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan, dengan tidak mengurangi penggantian yang sama, setiap kali mereka melakukan penipuan atau mempergunakan kecurangan.

Jadi bila terjadi kesalahan notaris sehingga berakibat aktanya “batal” atau “dibatalkan” oleh hakim, maka notaris bertanggung jawab secara yuridis, administratif dan moril.

Secara yuridis, notaris mulai bertanggung jawab sejak aktanya diperlakukan seperti akta di bawah tangan, karena tidak terpenuhi formalitas pembuatan suatu-akta notaris, sehingga notaris wajib membayar ganti kerugian dan bunga pada kliennya.¹⁴⁹⁾ Bila akta tersebut “dibatalkan” / dinyatakan “batal” berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tanggung jawabnya bertambah dengan tanggung jawab administratif, berupa pencatatan putusan tersebut dalam repertorium dan menjahit putusan pada akta yang dibatalkan,¹⁵⁰⁾ serta bertambah dengan tanggung jawab moril, baik terhadap organisasi notaris itu sendiri maupun terhadap masyarakat karena “track record” yang buruk, karena dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan tugas.

¹⁴⁹⁾ G.H.S. Lumban Tobing, *Op., Cit.*, hal 50.

¹⁵⁰⁾ Notaris Suyanto, catatan perkuliahan 2 Mei 2003

Kenyataan dalam praktek selama ini, terhadap pembatalan akta oleh Pengadilan, notaris hanya dihukum untuk menaati putusan yang bersangkutan.

Dan bila, terbukti notaris melakukan tindakan pidana dalam pembuatan akta notaris, misalnya tidak dihadiri oleh para pihak, atau bukan yang berhak yang menghadiri di depan notaris serta saksi yang ternyata fiktif belaka, maka notaris harus mempertanggung jawabkan tindakan pidana yang dilakukan berdasarkan KUHP disertai ancaman hilangnya jabatan / pemecatan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/106/SKB/VII/1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan notaris.

Semua ini sering dimunculkan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan akta otentik sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal pemalsuan (Pasal 263, 264, 266 KUHP), disamping kasus penipuan / Pasal 378 KUHP maupun penggelapan / Pasal 372 KUHP.¹⁵¹⁾

¹⁵¹⁾ Makbul Padamanegara, Pejabat Kapolri, Kedudukan dan fungsi Akta Otentik (Akta notaris) Sebagai Alat Bukti Dalam POLRI (Jakarta : Mabes POLRI) tanggal 23 Januari 2003, hal. 4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, terhadap kekuatan akta notaris sebagai alat bukti dalam praktek pengadilan, dikaitkan dengan permasalahan yang dikemukakan di dalam Bab Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Akta Notaris adalah akta otentik yang mempunyai pembuktian sempurna sampai dibuktikan sebaliknya, oleh karena itu, akta notaris rawan pembatalan.
 - a. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dibatalkannya oleh Pengadilan akta notaris yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:
 - 1) Kesalahan dalam bentuk akta notaris, yaitu apabila bentuknya suatu Pernyataan Keputusan Rapat (*akta partij*) sedang seharusnya adalah Berita Acara Rapat (*akta pejabat*), maka aktanya batal tapi isinya tidak.

Misalnya : PT. X mengundang notaris untuk membuat Berita Acara Rapat, oleh notaris dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat karena isinya menyangkut perubahan anggaran dasar PT.X tersebut, dimana hal

itu memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman, maka akta tersebut dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan untuk diperbaiki.

- 2) Bila aktanya terdapat cacat yuridis karena tidak terpenuhi syarat obyektif sahny suatu perjanjian maka baik akta maupun perbuatan hukumnya yaitu dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan berupa :

- (a) Kecakapan mereka yang mengikatkan diri
- (b) Sepakat mereka yang bersangkutan mengikatkan diri.

Contoh:

- (i) Putusan MA Nomor: 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa:

"Akta Notaris tidak dapat dibatalkan kecuali dalam proses pembuatannya terdapat adanya dwang, dwaling en bedrog"

- (ii) Putusan MA Nomor: 1904 K/SIP/1982 tanggal 30 Juli 1985 yang terkenal dengan kasus Luhur Sindoro Vs Ny. Oei Kwie Lian cs yang salah satu kaidah hukumnya menyatakan adanya ajaran "*misbruik van omstandigheden*" atau "*undue influence*" atau adanya "penyalahgunaan keadaan" yang membuat debitur menandatangani akta

notaris yang bersifat memberatkan baginya sehingga dapat diklasifikasikan hendak satu pihak.

- 3) Bila aktanya terdapat cacat yuridis karena tidak terpenuhi syarat obyektif sahnyanya suatu perjanjian maka baik akta maupun perbuatan hukumnya yaitu dinyatakan batal demi hukum, berupa :

(a) Mengenai suatu hal tertentu;

(b) Suatu sebab yang halal;

Misalnya : - Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan batal demi hukum bila tidak memenuhi persyaratan Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

- Pembuatan hibah wasiat (*testament*) adalah batal demi hukum apabila syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 930–948 KUHPdata tidak dipenuhi.

Maka isi dan aktanya batal demi hukum (*nietiegheid*), pembatalan yang tidak boleh tidak, harus terjadi dan oleh tiap-tiap orang, dapat dianggap batal sewaktu-waktu tidak menunggu putusan hakim.

4) Bila aktanya cacat yuridis karena :

- a) Notaris tidak berwenang membuat akta itu ;
- b) Notaris tidak berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;
- c) Notaris tidak berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat ;
- d) Notaris tidak berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Maka aktanya saja yang batal demi hukum tapi perbuatan hukumnya tidak, sehingga aktanya menjadi akta di bawah tangan.

Bila ditandatangani oleh para pihak.

2. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah:

- a. Notaris bertanggung jawab terhadap kekuatan akta otentik yang dibuatnya, bila diajukan sebagai alat bukti dalam praktek pengadilan, karena fungsi notaris tidak hanya sekedar “pencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap, namun lebih dari itu berfungsi selaku pejabat, pemberi bantuan hukum, Hakim dan pengusaha.

- b. Bila aktanya “batal” atau “dibatalkan” oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka notaris bertanggungjawab yuridisk, administrasi dan moril.

B. Saran

1. Dasar profesi notaris, adalah kepribadian notaris yang dilandasi sikap bebas (*independent*) atau mandiri, yang harus memberi pendapat yang didasarkan, pada pendapat dan pengetahuan yang jujur, sesuai dengan apa yang benar menurut hati nuraninya, untuk itu disarankan, notaris tidak terpengaruh kehendak pribadi, dari salah satu dari para pihak yang bersangkutan, walaupun pihak tersebut, adalah pihak yang menunjuk dan membayar honorarium notaris tersebut.
2. Notaris disarankan memegang teguh sikap kemandirian, tidak memihak serta didukung keahlian dan ketrampilan, sehingga diharapkan akan mengokohkan kepercayaan masyarakat pada profesi notaris, sebagai abdi masyarakat, karena produk yang dihasilkan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, meskipun kemudian, akta yang dihasilkan dinyatakan “batal” atau “dibatalkan” oleh Pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kesalahan notaris yang bersangkutan sudah diminimalisir, sehingga tanggung jawab yuridis dan morilnya tidak terlampau berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- A. Kohar. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung : Alumni, 1983.
- Ali Affandi, Prof. S.H. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Bina Aksara, 1986.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung : Alumni, 1983.
- _____. *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*. Bandung : Sumur Bandung, 1991.
- A.Pitlo, Prof. Mr. *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arief, S.H., Jakarta : PT. Intermasa, 1986.
- A.T. Hamid. *Perkara Perdata*. Surabaya : CV. Al-Ihsan, 1980.
- Bambang Waluyo, S.H. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Bachtiar Effendi, Masdari Tasmi, A. Chodari A.D.P. *Surat Gugat dan Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____. *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Jakarta : Bina Aksara, 1981.
- Bachsan Mustafa, S.H. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung : Alumni, 1984.
- Bidara, O., S.H., Martin P. Bidara, S.H.. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1987.
- BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, Prof. S.H. *Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Undip, 1994.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pertemuan Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnis di Indonesia*. Jakarta : BPHN, 1994.
- Chaidir Ali, S.H. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pembuktian Jilid I*. Bandung : Bina Cipta, 1979.

- Djoko Soepadmo, S.H. *Teknik Pembuatan Akta Seri B-4 Bagian Kedua*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994.
- _____. *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994.
- Herlien, S.H., ed. *Akta Otentik Dan Notaris Pada Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni F.H. UNPAR*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1998.
- Jujun. S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Keraf, Gorys, dr. *Komposisi*. Jakarta : Nusa Indah, 1984.
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung : Angkasa, 1984.
- Kurdianto, S.H. *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Surabaya : Usaha Nasional, 1987.
- Lilik Mulyadi, S.H. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2002.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Buku II*. Jakarta : Mahkamah Agung R.I. April 1994.
- _____. *Pelatihan Tehnis Yustisial Panitera dan Jurusita*. Jakarta : Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial, 1995.
- _____. *Pedoman Kerja Jalannya Peradilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Se- DKI Jakarta*, Jakarta : Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa tahun.
- _____. *Yurisprudensi Indonesia 2*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- _____. *Yurisprudensi Indonesia 3*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Mardalis, Drs. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Melton Putra, 1990.
- Mariam Darus B., Prof.DR. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1996.
- Martias gelar Imam Radjo Mulano. *Pembahasan Hukum, Pendjelasan-pendjelasan Istilah-istilah hukum Belanda – Indonesia Untuk Studie dan Praktijk*. Medan : Perusahaan Daerah Sumatra Utara, 1969.
- M. Nata Saputra, S.H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : CV. Rajawali, 1988.

- Martiman Prodjoamidjojo, S.H.,M.M. *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986, LN No. No. 77)*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Moleong, Lexy J., Dr. MA. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- Nana, Sudjana, DR. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Nasution, S., Prof. Drs., Prof. Dr. M. Thomas. *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Presentasi, Makalah*. Bandung : Jemmars, 1988.
- P.J. Soepratignja, S.H.Not. *Panduan Singkat Metode dan Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 1997.
- Panggabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta : Liberty, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cet.II*. Jakarta : Rajawali Press, 1982.
- R. Wirjono Prodjodikoro, Prof.,Dr.,S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Sumur, 1984.
- _____. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Bandung, 1979.
- R. Soesilo. *RIB HIR Dengan Penjelasan*. Bogor : Politea, 1985.
- R. Subekti, Prof., S.H. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 1984.
- _____. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1976.
- _____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.
- R. Tresna. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.

- Setiawan, S.H. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
- _____. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni, 1992.
- Simorangkir, J.C.T., S.H., *et.al*. *Kamus Hukum*. Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Sjahdeni, Sutan Remy, DR. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soejendro, J. Kartini, DR., S.H. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta : Kanisius, 2001.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet.XL, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1984.
- _____. *Hukum Acara Perdat*. Cet.III. Bandung : Bina Cipta, 1989.
- _____. *Hukum Pembuktian*. Cet.X. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- _____. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Soerjono Soekanto, Prof.Dr.S.H.M.A., dan Sri Mamudji, S.H.M.L.L. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soetrisno Hadi, MA. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset, 1988.
- Sri-Edi Swasono. *Pedoman Menulis Daftar Pustaka, Catatan Kaki dll., Untuk Karya dan Terbitan Ilmiah*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2001.
- Sumadi Surya Brata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sutantio, Retnowulan, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet.VI. Bandung : Mandar Maju, 1989.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Cet.I. Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
- _____. *Himpunan Surat-surat Edaran, Instruksi, Surat Keputusan, dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni, 1992.

- Tan Thong Kie. *Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1994.
- Teguh Samudra, S.H. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni, 1992.
- Tobing, G.H.S.L., S.H. *Peraturan Jabatan Notaris I*. Cet. III. Jakarta : Erlangga, 1992.
- Victor M. Situmorang, S.H. dan Dra. Cormentina Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
- W.F. Prins, Mr., terj. R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.
- W.J.S. P.Poewadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1983)
- Y.W. Sunindhia, S.H. dan Dra. Ninik Widiyanti. *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

- Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 tentang *Peraturan Jabatan Notaris*. mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860, terjemahan oleh G.H.S. Lumban Tobing, Jakarta : Airlangga, 1996.
- Orodonansi Staatsbald 1927 Nomor 227 , *Rbg (Reglement Buitengewesten)* berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927 khususnya Bab II pasal 104 sampai dengan pasal 323 Rbg. ditetapkan untuk luar Jawa dan Madura sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1099 K/Sip/1972 tanggal 30 Januari 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor ; 3 Tahun 1965.
- Ordonansi Staatblad 1848-16, opnieuw bekend gemaakt bij Staatblad 1926-559 en Staatblad 1941-44 , *HIR (Het herziene Indonesich Reglement atau Reglement Indonesia Baru)*, Bab IX. Tentang "Reglement tentang perkara perdata yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri golongan Bumiputera dan Timur Asing Jawa dan Madura.", Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1099K/Sip/1972.
- Orodonansi Staatblad 1847 Nomor 52 Jo. Staatblad 1849 Nomor 63, *Rv. (Reglement op de Burgerlijk Rechtsvoorderaden van Justitie opa Java en het hoogerechtshof van Indonesie, alsmede voor de risidentiegerechten op Java en Madura)* lazim disebut Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.

Ordonansi Staatblad 1847 Nomor 1847 Nomor 23, *Wvk (Wetboek Van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)*, Terjemahan dari R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tahun 1983, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman Soehardjo yang dikuatkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1963, Burgerlijk Wetboek bukan sebagai UU tapi sebagai Kitab Hukum (Sumber Hukum).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diundangkan tanggal 17 Desember 1970 dalam Lembaran Negara R.I. tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2951.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, diundangkan 30 Desember 1985 dalam Lembaran Negara R.I. tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3316.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, diundangkan tanggal 08 Maret 1986 Nomor 20, dalam Lembaran Negara R.I. Nomor 20.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1984 tentang *Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris*, Jakarta : Mahkamah Agung, 1 Maret 1984.

Presiden Republik Indonesia, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor..... Tahun..... tentang Jabatan Notaris.

Lain-lain

Fatlah Helmi. “Pembuatan Akta Notaris Dalam Rangka Penawaran Saham.” *Majalah Media Notariat*. (Oktober-Desember 2002), 66 – 75.

Habib Adjie. “Penegakan Etika Profesi Notaris.” *Majalah Media Notariat*. (April – Juni 2002), 6 – 18.

———. “Mengukur Batas Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Umum.” *Majalah Media Notariat*. (Juli- September 2002), 40 – 43.

———. “Mungkinkah UU Jabatan Notaris Selesai Tahun 2002-2004.” *Majalah Media Notariat*. (Juli- September 2002), 55 – 56.

Herlien Budiono. “Asas Keseimbangan Bagi Hukum Kontrak Indonesia.” *Majalah Media Notariat*. (Januari – Maret 2002), 40 – 68.

- Irfan Fachrudin. "Kedudukan Notaris-Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa TUN." *Majalah Varia Peradilan*. Tahun X No. III B. (Desember 1994), 144 – 151.
- Liliana Budi Santoso, "Tinjauan yuridis terhadap kekuatan mengikatnya akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris" Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1995.
- Lotulung, Paulus Effendi. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya." *Majalah Media Notariat*. (April – Juni 2002), 1 – 5.
- _____. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya." *Majalah Media Notariat*. (Juli – September 2002), 35 – 39.
- Makbul Padmanegara, Pejabat Kapolri. *Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik (Akta Notaris) Sebagai Alat Bukti Dalam Pandangan POLRI*. Jakarta : Mabes POLRI, tanggal 23 Januari 2003. 1- 10.
- Noor Rahardjo. "Aspek-aspek Perpajakan Bagi Notaris Dan Atau PPAT Sebagai Pejabat Publik." *Majalah Media Notariat*. Vol. XXX No.3. (Juli – September 2001). 166 – 172.
- Pohan, A.Portomuan. *Fungsi dan Peranan Notaris Selaku Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Diskusi Terbatas Tentang Pasar Modal Indonesia Sekarang dan Akan Datang*. Jakarta : Ruang Dirgantara Hotel Ambara, 16-17 September 1996.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 358/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar. tanggal 27 Pebruari 2003.
- _____, Nomor 001/Pdt.G/2000/PN.Jkt. Bar. Tanggal 13 Juni 2000.
- Suhardjono, S.H. "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum." *Majalah Varia Peradilan*. Tahun XI-No.123 (Desember 1995), 128 – 136.
- Syamsudin Aboebakar, S.H. Ketua Muda Bidang Perdata Tertulis Mahkamah Agung Republik Indonesia- Pada Upgrading- Refreshing Cours Notaris se Indonesia- di Bandung tanggal 29 April 1995, "Common Law dan Pengaruhnya di Indonesia," *Majalah Media Notariat*. Nomor 34-35-36-37 Januari- April-Juli- Oktober-1995.
- Tedjosaputro, Liliana. "Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana." Disertasi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Universitas Diponegoro Semarang. *Catatan Kuliah Teknik Pembuatan Akta I*, Program Studi Notariat Spesialis I. Semarang : UNDIP Semarang, 1997/1998.

Wawan Setiawan, S.H. " Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis dan Otentik Menurut Hukum Positif Indonesia." *Majalah Media Notariat* (Jan-April-Juli-Oktober 1995). 53-93.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. *Nomor 1904 K/Sip/1982* tanggal 30 Juli 1985. "Kasus Luhur Sundoro." *Majalah Varia Peradilan*. Nomor Perdana. (Oktober 1985), 7 – 15.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. *Nomor 78 PK/Pdt/1984* tanggal 9 April 1987. "Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali." Jakarta : PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, 128.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. *Nomor 3804 K/Sip/1981* tanggal 30 Mei 1981 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 01/1978/PT. Jakarta Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat/Selatan Nomor 120/Pdt.G/1977/PN. Jkt.Bar. tanggal 5 April 1977.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 702 K/Pdt/1973 tanggal 8 September 1973.